



LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023

Audited
2023



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750

Telp: (021) 29681560, Faks: (021) 29681551, Surel: lpsk_ri@lpsk.go.id

Website: www.lpsk.go.id

Nomor : B-1720/2.3.2.UDK/LPSK/05/2024

8 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2023
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
c.q. Auditor Utama Keuangan III
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Nomor S-8/PB/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited, dengan hormat kami sampaikan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2023 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

Penyajian Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP. 196409051990031004



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750

Telp: (021) 29681560, Faks: (021) 29681551, Surel: lpsk_ri@lpsk.go.id

Website: www.lpsk.go.id

Nomor	: B-1721/2.3.2.UDK/LPSK/05/2024	8 Mei 2024
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Perihal	: Penyampaian Laporan Keuangan <i>Audited</i> Tahun 2023 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jalan Lapangan Banteng Nomor 2-4
Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Nomor S-8/PB/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024 hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited, dengan hormat kami sampaikan Laporan Keuangan *Audited* Tahun Anggaran 2023 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

Penyajian Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Republik Indonesia,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP. 196409051990031004



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750
Telp: (021) 29681560, Faks: (021) 29681551, Surel: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Periode Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 8 Mei 2024



Ida Swastika, S.E.
NIP.196905161989032001



KATA PENGANTAR

Audited

The bottom half of the page features an abstract graphic design. It consists of several overlapping, flowing lines in red and grey, creating a sense of movement and depth. The lines are smooth and curved, with some areas appearing more solid and others more transparent, giving it a layered, architectural feel.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2023 (*Audited*) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP.196409051990031004



DAFTAR ISI DAN DAFTAR TABEL

Audited

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
F. Pengungkapan Penting Lainnya	67

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel A.1 Kriteria Kualitas Piutang.....	13
Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel B.1 Rincian Revisi DIPA Tahun 2023	17
Tabel B.2 Rincian Pagu Anggaran per Jenis Belanja	18
Tabel B.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022	19
Tabel B.4 Rincian Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	20
Tabel B.5 Rincian Penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu	20
Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023	21
Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	22
Tabel B.8 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2023	23
Tabel B.9 Rincian Pengembalian Belanja Pegawai	23
Tabel B.10 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	25
Tabel B.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023	26
Tabel B.12 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022	26
Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023	27
Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	28
Tabel B.15 Realisasi Belanja Modal TA 2023	28
Tabel B.16 Alokasi Anggaran Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19	28
Tabel B.17 Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2023 dan 2022	29
Tabel B.18 Program Rekomendasi Kebijakan	31
Tabel B.19 Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban	33
Tabel B.20 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban TPKSA	34
Tabel B.21 Pengungkapan Capaian Output per Fungsi APBN	35
Tabel B.22 Tabel Capaian Output Strategis Lainnya	36
Tabel C.1 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022	37
Tabel C.2 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023	38
Tabel C.3 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2023	38
Tabel C.4 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	39
Tabel C.5 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022	40
Tabel C.6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	47
Tabel C.7 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	47
Tabel C.8 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	50
Tabel D.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022	53
Tabel D.2 Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022	54
Tabel D.3 Perbandingan Realisasi Beban Operasional TA 2023 Menurut LO dan LRA	54
Tabel D.4 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022	54
Tabel D.5 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai TA 2023 LO dan LRA	55
Tabel D.6 Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022	55
Tabel D.7 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan TA 2023 LO dan LRA	56
Tabel D.8 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022	57
Tabel D.9 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barjas TA 2023 LO dan LRA	57

Tabel D.10 Rincian Selisih Beban Keperluan Perkantor TA 2023 LO dan LRA	58
Tabel D.11 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022	60
Tabel D.12 Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan TA 2023 LO dan LRA...	60
Tabel D.13 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022	61
Tabel D.14 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022	61
Tabel D.15 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022	62
Tabel D.16 Rincian Kegiatan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 2023 dan 2022..	63



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor, KM. 24, No. 47-49, Jakarta 13750
Telp: (021) 29681560, Faks: (021) 29681551, Surel: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 8 Mei 2024
Pendauna Anggaran,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP. 196409051990031004



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Audited

The bottom half of the page features an abstract graphic design. It consists of several overlapping, flowing lines in shades of red and grey, creating a sense of movement and depth. The lines are smooth and curved, resembling stylized waves or a modern architectural design.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan *Audited* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp643.624.002,00. Tidak ada estimasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Negara pada *Audited* Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp294.241.499.614,00 atau mencapai 99,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp296.234.394.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp398.426.132.476,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp281.213.181,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp394.388.982.382,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp3.755.936.913,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp701.650.388,00 dan Rp397.724.482.088,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk *Audited* adalah sebesar Rp22.701.384,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp158.881.961.539,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp158.859.260.155,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp48.958.724,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp158.810.301.431,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp234.989.317.600,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp158.810.301.431,00, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp60.163.307,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp321.485.302.612,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp397.724.482.088,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	643.624.002	100	133.237.784
JUMLAH PENDAPATAN		-	643.624.002	100	133.237.784
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	24.835.247.000	23.665.349.798	95	18.588.260.603
Belanja Barang	B.2.2	116.525.915.000	115.922.659.096	99	93.517.538.924
Belanja Modal	B.2.3	154.873.232.000	154.653.490.720	100	67.771.865.104
JUMLAH BELANJA		296.234.394.000	294.241.499.614	99	179.877.664.631

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP.196409051990031004

II. NERACA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di bendahara Pengeluaran	C.1.1.	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2.	15.366.818	893.242.834
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.3.	3.233.600	104.339.832
Persediaan	C.1.4.	262.612.763	118.043.649
Jumlah Aset Lancar		281.213.181	1.115.626.315
ASET TETAP	C.2.		
Tanah	C.2.1.	115.257.138.280	88.179.767.280
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	112.687.705.297	62.428.957.557
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	227.740.585.177	92.364.012.422
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	8.690.792	8.690.792
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	82.720.632	82.720.632
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6.	3.131.310.500	46.663.799.586
Akumulasi Penyusutan	C.2.7.	(64.519.168.296)	(53.859.540.074)
Jumlah Aset Tetap		394.388.982.382	235.868.408.195
ASET LAINNYA	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	4.681.402.268	2.010.973.575
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2.	1.340.116.387	-
Aset Lain-Lain	C.3.3.	7.095.373.227	1.006.871.443
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4.	(9.360.954.969)	(2.689.875.954)
Jumlah Aset Lainnya		3.755.936.913	327.969.064
JUMLAH ASET		398.426.132.476	237.312.003.574
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	687.943.237	2.322.685.974
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.2.	13.707.151	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		701.650.388	2.322.685.974
JUMLAH KEWAJIBAN		701.650.388	2.322.685.974
EKUITAS	C.5.		
Ekuitas	C.5.	397.724.482.088	234.989.317.600
JUMLAH EKUITAS		397.724.482.088	234.989.317.600
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		398.426.132.476	237.312.003.574

Jakarta, 8 Mei 2024
Pegguna Anggaran,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP.196409051990031004

III. LAPORAN OPERASIONAL**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN****LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022****AUDITED**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.	22.701.384	-
JUMLAH PENDAPATAN		22.701.384	-
BEBAN	D.2.		
Beban Pegawai	D.2.1.	23.658.245.798	18.595.364.603
Beban Persediaan	D.2.1.	1.562.757.419	1.485.658.534
Beban Barang dan Jasa	D.2.3.	53.442.353.117	40.764.401.034
Beban Pemeliharaan	D.2.4.	4.065.198.709	3.101.434.186
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5.	58.826.884.520	47.974.033.341
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6.	17.326.521.976	7.254.356.291
JUMLAH BEBAN		158.881.961.539	119.175.247.989
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(158.859.260.155)	(119.175.247.989)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1.	27.999.999	-
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		27.999.999	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2.	20.958.725	133.237.784
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		20.958.725	133.237.784
Jumlah Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		48.958.724	133.237.784
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		48.958.724	133.237.784
SURPLUS/DEFISIT LO		(158.810.301.431)	(119.042.010.205)

Jakarta, 8 Mei 2024
Pegguna Anggaran,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP.196409051990031004

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	234.989.317.600	174.285.801.958
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(158.810.301.431)	(119.042.010.205)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	60.163.307	1.099.000
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4	60.163.307	1.099.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	321.485.302.612	179.744.426.847
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		162.735.164.488	60.703.515.642
EKUITAS AKHIR	E.6	397.724.482.088	234.989.317.600

Jakarta, 8 Mei 2024
Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA.
NIP.196409051990031004



**PENDAHULUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(C A L K)**

Audited

The bottom half of the page features an abstract graphic design. It consists of several overlapping, flowing lines in shades of red and grey, creating a sense of movement and depth. The lines are smooth and curved, resembling stylized waves or a modern architectural element. The background is a light grey with a subtle grid pattern, which is more visible in the upper half of the page.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Rencana strategis yang ingin dicapai oleh LPSK dalam jangka lima tahun adalah:

1. Arah kebijakan pertama, akselerasi peningkatan kualitas layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:
 - a. Terwujudnya pelayanan yang prima dalam memberikan layanan perlindungan terhadap saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli yang aman, nyaman, bebas dari rasa takut;
 - b. Terwujudnya pelayanan yang prima dalam memberikan layanan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan psikologis terhadap korban tindak pidana,
 - c. Terwujudnya pelayanan prima untuk memfasilitasi kompensasi dan restitusi.
 - d. Selanjutnya akselerasi peningkatan kualitas layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban tersebut akan dicapai melalui strategi:
 - 1) Memperpendek birokrasi proses layanan LPSK.

- 2) Proaktif dalam penanganan Saksi dan Korban tanpa menunggu permohona sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 3) Pemenuhan hak-hak korban sesuai mandat Undang-undang.
 - 4) Revitalisasi tim reaksi cepat untuk melayani saksi dan korban.
 - 5) Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban sehingga bebas dari rasa takut dan ancaman.
2. Arah kebijakan kedua, peningkatan akses layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban” dicapai dengan strategi:
 - 1) Membuka kantor LPSK Perwakilan di beberapa wilayah yang direncanakan antara lain Medan, Makassar, D.I Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang, Pontianak, Papua, Papua Barat, Kaltim, Babel, Riau, Ambon, NTT, dan Sulawesi Utara.
 - 2) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 3) Menginisiasi kelompok masyarakat untuk peduli terhadap hak-hak saksi dan korban.
 - 4) Mengembangkan media informasi dan media penerimaan layanan permohonan di LPSK.
 - 5) Pembangunan sistem aplikasi layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang terintegrasi dalam internal LPSK.
3. Arah kebijakan ketiga, peningkatan manajemen kelembagaan untuk mendukung layanan yang professional dan akuntabel untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang akuntabel” dicapai dengan strategi sebagai berikut:
 - 1) Akselerasi peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - 2) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka akselerasi peningkatan anggaran LPSK.
 - 3) Memperkuat landasan hukum dan tata kelola pelaksanaan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban.
 - 4) Akselerasi peningkatan sarana dan prasarana pendukung layanan

perlindungan saksi dan korban antara lain dengan memanfaatkan potensi pihak terkait sesuai ketentuan.

- 5) Pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi.
- 6) Perlu pengkajian mendalam untuk membesarkan LPSK antara lain melalui restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal LPSK.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Data Barang Milik Negara (BMN) yang disajikan dalam neraca telah seluruhnya diproses melalui aplikasi Sistem Aplikasi Tingkat Instansi (SAKTI). Aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang membantu SAI dalam menyusun laporan keuangan. Pada aplikasi SAKTI, sistem sudah terintegrasi antar modul mulai dari dengan adanya jurnal di beberapa titik pengakuan jurnal secara manual. Modul-modul dalam aplikasi SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul pelaksanaan anggaran (komitmen, bendahara, dan pembayaran), dan modul pelaporan (aset tetap, persediaan, serta general ledger dan pelaporan).

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel A.1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 untuk nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- d. Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/lembaga sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

*Penyusutan
Aset Tetap*

b. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(L R A)**

Audited

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu awal yang tersedia untuk tahun 2023 sesuai dengan Nomor Pengesahan SP DIPA-123.01.1.439005/2023 dengan *Digital Stamp* DS:3410-0580-9153-0170 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp228.163.494.000,00. Anggaran tersebut selanjutnya direvisi sebanyak 11 kali, terakhir pada tanggal 28 Desember 2023 dengan Nomor SP DIPA-123.01.1.439005/2023 dan *Digital Stamp* DS:0783-5470-4505-3194 menjadi sebesar Rp296.234.394.000,00. Berikut rincian revisi DIPA, dari revisi ke-1 s.d revisi ke-11.

Tabel B.1

Rincian Revisi DIPA Tahun 2023

No	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Revisi ke	Nilai DIPA (Rp)
1.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	30-11-2022	-	228.163.494.000
2.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	26-12-2022	1	228.163.494.000
3.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	10-01-2023	2	293.697.349.000
4.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	20-02-2023	3	293.697.349.000
5.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	11-04-2023	4	293.697.349.000
6.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	12-06-2023	5	293.697.349.000
7.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	12-07-2023	6	293.697.349.000
8.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	21-07-2023	7	291.935.767.000
9.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	30-08-2023	8	291.935.767.000
10.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	13-10-2023	9	291.935.767.000
11.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	21-11-2023	10	296.234.394.000
12.	SP DIPA-123.01.1.439005/2023	28-12-2023	11	296.234.394.000

Rincian revisi DIPA ke-1 s.d. ke-11 adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA ke-1 terkait Pembayaran tunggakan belanja barang Tahun Anggaran 2022 dengan Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
2. Revisi DIPA ke-2 terkait dengan Penambahan anggaran dana hibah luar negeri sebesar Rp65.533.855.229,00 yang merupakan pendanaan

hibah *Counterpart Fund Non Project Grant Aid (CF-NPGA)* dari Negara Jepang;

3. Revisi DIPA ke-3 terkait dengan pencatatan tunggakan belanja barang Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan rencana penarikan dana Hibah Luar Negeri;
4. Revisi DIPA ke-4 terkait dengan perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA;
5. Revisi DIPA ke-5 Pergeseran anggaran yang bersumber dari Hibah dalam 1 (satu) Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
6. Revisi DIPA ke-6 Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA
7. Revisi DIPA ke-7 Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Berubah
8. Revisi DIPA ke-8 Pembukaan blokir atas pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) dalam hal pagu anggaran tetap.
9. Revisi DIPA ke-9 Revisi anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi.
10. Revisi DIPA ke-10 Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 998.08) ke BA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (BA 123), Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA, Perubahan catatan Halaman IVB DIPA akibat pencantuman anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08;
11. Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan pada Database RKA-K/L DIPA
12. Rincian pagu anggaran semula dan setelah revisi per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.2

Rincian Pagu Anggaran per Jenis Belanja

Uraian	2023	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Barang	116.060.309.000	116.525.915.000
Belanja Pegawai	22.510.708.000	24.835.247.000
Belanja Modal	89.592.477.000	154.873.232.000
Jumlah	228.163.494.000	296.234.394.000

Perimaan Negara Bukan
Pajak
Rp643.624.002,00

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk TA 2023 adalah sebesar Rp643.624.002,00 dan tidak ada estimasi pendapatan pada TA 2023. Pendapatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berasal dari setoran pengembalian belanja atas kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2023. Realisasi PNBPN pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 383,06 persen dibandingkan TA 2022.

Tabel B.3

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik/ (Turun)	
			Rupiah	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	22.701.384	-	22.701.384	100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	27.999.999	-	27.999.999	100,00
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	22.726.877	78.696.876	(55.969.999)	(71,12)
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	483	54.540.908	(54.540.425)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	570.195.259	-	570.195.259	100,00
Jumlah	643.624.002	133.237.784	510.386.218	383,06

Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp22.701.384,00 merupakan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan pengadaan *Videotron*.

Pendapatan dari penjualan peralatan dan Mesin sebesar Rp27.999.999,00, berupa Lelang 1 paket BMN berupa Sisa bongkaran Bangunan Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Risalah Lelang Nomor RL-792/26/2023 pada tanggal 13 September 2023.

Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp22.726.877,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.4

Rincian Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu

No	Uraian Pengembalian Belanja	Nilai
1.	Pengembalian atas belanja pembelian walky talky B4	517.500
2.	Pengembalian atas belanja jamuan SMPL	115.000
3.	Pengembalian atas belanja renovasi toilet B5	17.094.243
4.	Pengembalian belanja barang PHSK	741.828
5.	Pengembalian belanja barang UDK	658.306
6.	Pengembalian belanja barang atas kegiatan perjalanan dinas	3.600.000
Jumlah		22.726.877

Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp483,00 merupakan kelebihan atas pembulatan gaji pegawai.

Penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp570.195.259,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.5

Rincian Penerimaan kembali belanja modal Tahun Anggaran yang lalu

No	Uraian Pengembalian Belanja	Nilai
1.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Pembangunan P-4	400.426.689
2.	Penerimaan kembali belanja Uang perjalanan dinas dalam proses Pembangunan Gedung P-4 pada tanggal 29 Des 2022	2.196.000
3.	Penerimaan atas kekurangan pekerjaan pengadaan pembuatan jalur pedestrian	25.780.104
4.	Penerimaan atas kekurangan pekerjaan pengadaan renovasi pos security	15.710.016
5.	Penerimaan atas kekurangan pekerjaan pengadaan renovasi ruang tunggu VIP	123.622.400
6.	Penerimaan atas kekurangan pekerjaan renovasi lantai 5 sebesar	670.050
7.	Pengembalian atas belanja modal Gedung P-4	670.000
8.	Pengembalian atas belanja modal Uang Harian perjalanan dinas dalam proses Pembangunan Gedung P-4	1.120.000
Jumlah		570.195.259

Belanja Negara

Rp294.241.499.614,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja untuk TA 2023 adalah sebesar Rp294.241.499.614,00 atau 99,33 persen dari anggaran belanja sebesar Rp296.234.394.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel B.6 di bawah ini:

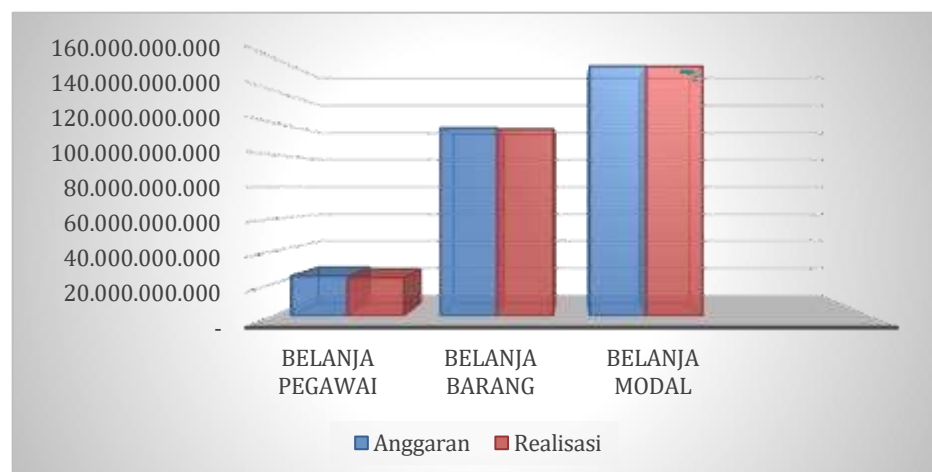
Tabel B.6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%REAL. ANGG
Belanja Pegawai	24.835.247.000	23.665.349.798	95,29
Belanja Barang	116.525.915.000	115.922.659.096	99,48
Belanja Modal	154.873.232.000	154.653.490.720	99,86
Jumlah	296.234.394.000	294.241.499.614	99,33

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Diagram B.1 berikut ini:

Diagram B.1



Realisasi pada tahun anggaran 2023 tercapai 99,33 persen, jika dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 26,07 persen menjadi 99,33 persen. Hal ini disebabkan penyelesaian belanja modal yang berasal dari Dana Hibah Langsung yang diterima oleh LPSK.

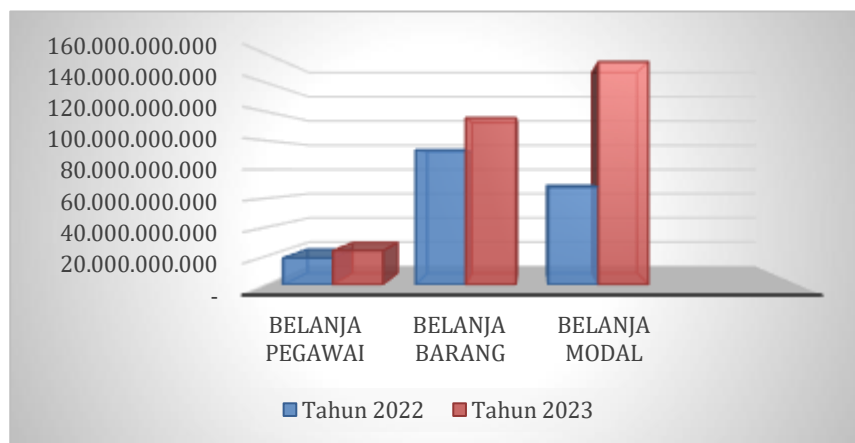
Tabel B.7

Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	2023			2022			Naik/ (Turun) dalam %
	Anggaran	Realisasi	Naik/ (Turun) dalam %	Anggaran	Realisasi	Naik/ (Turun) dalam %	
Belanja Pegawai	24.835.247.000	23.665.349.798	95,29	18.627.093.000	18.588.260.603	99,79	(4,50)
Belanja Barang	116.525.915.000	115.922.659.096	99,48	93.589.061.000	93.517.538.924	99,92	(0,44)
Belanja Modal	154.873.232.000	154.653.490.720	99,86	133.317.071.000	67.771.865.104	50,84	49,02
Jumlah	296.234.394.000	294.241.499.614	99,33	245.533.225.000	179.877.664.631	73,26	26,07

Komposisi perbandingan realisasi belanja TA 2023 dengan TA 2022 dapat dilihat dalam Diagram B.2 berikut ini:

Diagram B.2



Belanja Pegawai
Rp23.665.349.798,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.665.349.798,00 dan Rp18.588.260.603,00. Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,31 persen dari anggaran 2022.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.8

Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi Netto	%
Belanja Gaji Pokok PNS	5.600.837.000	5.452.765.650	97,36
Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.778.000	95.420	0,75
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	319.843.000	299.920.198	93,77
Belanja Tunj. Anak PNS	137.760.000	80.269.964	58,27
Belanja Tunj. Struktural PNS	329.000.000	294.280.000	89,45
Belanja Tunj. Fungsional PNS	346.450.000	325.954.000	94,08
Belanja Tunj. PPh PNS	82.950.000	60.381.999	72,79
Belanja Tunj. Beras PNS	316.837.000	296.270.220	93,51
Belanja Uang Makan PNS	768.285.000	716.514.000	93,26
Belanja Tunjangan Umum PNS	280.985.000	261.970.000	93,23
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	4.542.437.000	4.282.195.660	94,27
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	3.386.664.000	3.136.004.222	92,60
Belanja Uang Lembur	258.000.000	182.383.000	70,69
Belanja Uang Lembur PPPK	42.000.000	14.184.000	33,77
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6.153.800.000	6.040.143.466	98,15
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.085.075.000	1.077.777.737	99,33
Belanja Gaji Pokok PPPK	845.453.000	845.452.500	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.000	11.942	99,52
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	41.828.000	41.827.650	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	11.806.000	11.569.350	98,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.040.000	16.960.000	94,01
Belanja Tunjangan Beras PPPK	45.118.000	44.972.820	99,68
Belanja Uang Makan PPPK	209.289.000	183.446.000	87,65
Jumlah Belanja	24.835.247.000	23.665.349.798	95,29

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp23.665.349.798,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp23.685.359.206,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp20.009.408,00 dengan rincian pengembalian sebagai berikut :

Tabel B.9

Rincian Pengembalian Belanja Pegawai

per 31 Desember 2023

No	Uraian Pengembalian Belanja	Nilai
1.	Belanja Gaji Pokok PNS	19.262.600
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.808
3.	Belanja Tunjangan Umum PNS	740.000
	Jumlah	20.009.408

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp20.009.408,00 berasal dari rincian sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas Belanja Gaji Pokok PNS bulan Agustus atas nama Azalia Firdais dengan nomor SPM 01936A sebesar Rp2.603.200,00;
- b. Pengembalian atas Belanja Gaji Pokok PNS bulan September Atas Nama Agus Fitriana sebesar Rp3.608.500,00;
- c. Pengembalian atas Belanja Gaji Pokok PNS Atas Nama Yulia Pasha Bulan Mei, Juni dan Gaji 13 sebesar Rp13.050.900,00;
- d. Pengembalian Belanja atas Pembulatan Gaji PNS berasal dari SPM 00761A sebesar Rp116,00, SPP 03342T sebesar Rp81,00, SPM 01688A sebesar Rp312,00, SPM 01687A sebesar Rp4.438,00, dan SPM 00933A sebesar Rp1.861,00;
- e. Pengembalian Tunjangan Umum PNS berasal dari potongan Tunjangan Umum PNS atas Pembayaran Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Bulan Juli sd Agustus 2023 untuk 2 Pegawai/7 Jiwa atas nama Andri Umar Sidik dan Sutopa dengan nomor SPM 03314A sebesar Rp740.000,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp18.588.260.603,00 terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp5.077.089.195,00 atau 27,31 persen terutama karena adanya penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.10
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun)	
			Rupiah	%
Belanja Gaji Pokok PNS	5.452.765.650	4.343.100.200	1.109.665.450	25,55
Belanja Pembulatan Gaji PNS	95.420	91.884	3.536	3,85
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	299.920.198	227.716.758	72.203.440	31,71
Belanja Tunj. Anak PNS	80.269.964	55.135.164	25.134.800	45,59
Belanja Tunj. Struktural PNS	294.280.000	343.160.000	(48.880.000)	(14,24)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	325.954.000	295.616.000	30.338.000	10,26
Belanja Tunj. PPh PNS	60.381.999	27.447.495	32.934.504	119,99
Belanja Tunj. Beras PNS	296.270.220	240.144.720	56.125.500	23,37
Belanja Uang Makan PNS	716.514.000	683.808.000	32.706.000	4,78
Belanja Tunjangan Umum PNS	261.970.000	211.590.000	50.380.000	23,81
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	4.282.195.660	3.499.805.580	782.390.080	22,36
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	3.136.004.222	2.993.935.050	142.069.172	4,75
Belanja Uang Lembur	182.383.000	180.813.000	1.570.000	0,87
Belanja Uang Lembur PPPK	14.184.000	-	14.184.000	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6.040.143.466	5.485.896.752	554.246.714	10,10
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.077.777.737	-	1.077.777.737	100,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	845.452.500	-	845.452.500	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.942	-	11.942	100,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	41.827.650	-	41.827.650	100,00
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	11.569.350	-	11.569.350	100,00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	16.960.000	-	16.960.000	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	44.972.820	-	44.972.820	100,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	183.446.000	-	183.446.000	100,00
Jumlah Belanja	23.665.349.798	18.588.260.603	5.077.089.195	27,31

Belanja Barang
Rp115.922.659.096,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp115.922.659.096,00 dan Rp93.517.538.924,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi Netto	%
Belanja Barang Operasional	18.060.389.000	18.057.235.000	99,98
Belanja Barang Non Operasional	13.797.787.000	13.730.509.415	99,51
Belanja Barang Persediaan	1.710.058.000	1.709.300.278	99,96
Belanja Jasa	19.304.502.000	19.225.135.902	99,59
Belanja Pemeliharaan	4.049.871.000	4.046.429.709	99,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	53.319.582.000	52.875.601.105	99,17
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.283.726.000	6.278.447.687	99,92
Jumlah Belanja	116.525.915.000	115.922.659.096	99,48

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp115.922.659.096,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp116.823.562.737,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp900.903.641,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp22.405.120.172,00 atau 23,96 persen antara lain dikarenakan terdapat kenaikan pada semua akun belanja barang, terutama belanja jasa dan belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan luar negeri.

Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.12
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun)	
			Rupiah	%
Belanja Barang Operasional	18.057.235.000	16.415.136.889	1.642.098.111	10,00
Belanja Barang Non Operasional	13.730.509.415	12.407.778.977	1.322.730.438	10,66
Belanja Barang Persediaan	1.709.300.278	1.416.615.178	292.685.100	20,66
Belanja Jasa	19.225.135.902	12.488.487.137	6.736.648.765	53,94
Belanja Pemeliharaan	4.046.429.709	3.348.765.035	697.664.674	20,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	52.875.601.105	44.535.040.229	8.340.560.876	18,73
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.278.447.687	2.905.715.479	3.372.732.208	116,07
Jumlah Belanja	115.922.659.096	93.517.538.924	22.405.120.172	23,96

Terdapat realisasi belanja dari akun Belanja Keperluan Perkantoran yang dicatat ke dalam Peralatan dan Mesin sebesar Rp197.252.550,00 dengan nomor SPM 3093A berupa meja dan kursi.

Belanja Modal
Rp154.653.490.720,00

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp154.653.490.720,00 dan Rp 67.771.865.104,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.13

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi Netto	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.705.803.000	33.595.893.854	99,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.840.402.000	117.835.877.871	100,00
Belanja Modal Lainnya	3.327.027.000	3.221.718.995	96,83
Jumlah Belanja	154.873.232.000	154.653.490.720	99,86

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar Rp86.881.625.616,00 atau 128,20 persen yang disebabkan oleh penerimaan dana hibah luar negeri sebesar Rp65.533.855.000,00.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun)	
			Rupiah	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.595.893.854	18.790.608.802	14.805.285.052	78,79
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.835.877.871	48.802.351.302	69.033.526.569	141,46
Belanja Modal Lainnya	3.221.718.995	178.905.000	3.042.813.995	1.700,80
Jumlah Belanja	154.653.490.720	67.771.865.104	86.881.625.616	128,20

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp154.653.490.720,00 telah dicatat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.15
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	33.390.970.854
2	Belanja Peralatan dan Mesin menjadi Ekstrakomtabel	3.500.000
3	Peralatan dan Mesin Menjadi ATB	73.423.000
4	Pengembangan Nilai Aset Langsung Peralatan dan Mesin	128.000.000
5	Gedung dan Bangunan	114.704.567.371
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Gedung dan Bangunan	3.131.310.500
7	Aset Tak Berwujud	3.221.718.995
	Jumlah	154.653.490.720

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp154.653.490.720,00 terdapat penggunaan untuk realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.416.992.958,00, berupa kegiatan Capacity Building sebesar Rp2.760.436.958,00 dan kegiatan alih media arsip kertas sebesar Rp656.556.000,00.

B.3 Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada TA 2023 mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp267.109.000,00 atau 0,23% dari anggaran belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan 31 Desember 2023 anggaran tersebut terserap 100 persen sebesar Rp267.108.911,00.

Tabel B.16

Alokasi Anggaran Belanja Barang untuk Penanganan Covid-19

Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Penyerapan (%)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	267.109.000	267.108.911	-	100,00
	Jumlah	267.109.000	267.108.911	-	100,00

Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp497.379.412,00 terdapat penurunan realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp230.270.501,00 atau 46,30 persen yang disebabkan adanya penghentian belanja menggunakan akun COVID-19 sesuai dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor : S-24/PB/PB.6/2023 tentang Penggunaan akun khusus COVID-19. Realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 bulan Januari s.d. Agustus Tahun 2023 terealisasi sebesar 76,83% dan bulan September s.d. Desember 2023 terealisasi sebesar 23,17%. Perbandingan realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel B.17

**Perbandingan Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Uraian	2023	2022	Naik/ (Turun)	
			Rupiah	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	267.108.911	372.548.899	(105.439.988)	(28,30)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	59.995.000	(59.995.000)	(100,00)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	64.835.513	(64.835.513)	(100,00)
Jumlah Belanja	267.108.911	497.379.412	(230.270.501)	(46,30)

B.4 Pengungkapan Output Strategis pada Catatan Atas Laporan Keuangan

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai berikut:

1. Pada Program Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana memiliki beberapa output strategis berupa Peraturan Sekjen LPSK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Program Rehabilitasi Psikososial bagi Petugas LPSK dan Peluncuran *Grand Strategy* Program Rehabilitasi Psikososial Bagi Korban Tindak Pidana, yang dilaksanakan melalui Kerjasama antara Pemerintah dengan beberapa Institusi Mitra Program Rehabilitasi Psikososial, dengan memiliki beberapa tahapan kegiatan berupa:
 - a. Pada Triwulan I Tahun 2023 telah disusun *Road Map* Program Rehabilitasi Psikososial Korban TP yang memuat tujuan, sasaran, indikator, ruang lingkup, pelaksana, dan target capaian, termasuk strategi dan tahap pelaksanaan program. Program ini direncanakan untuk dilaksanakan selama tujuh tahun yaitu dari 2023 sampai dengan 2029, melalui empat fase/tahap yaitu fase revitalisasi (2023-2024), fase pengembangan (2024-2027), fase pematangan (2027-2028), dan fase pelembagaan (2028-2029).
 - b. Pada Triwulan II, telah disusun rancangan pedoman umum pelaksanaan program rehabilitasi psikososial yang siap untuk diperiksa Pimpinan LPSK (naskah terlampir). Rancangan yang sudah dikoreksi berdasarkan masukan Pimpinan LPSK akan disosialisasikan kepada pihak *stakeholder* LPSK yaitu mitra-mitra strategis dengan bidang kerja sesuai dengan program rehabilitasi psikososial.
 - c. Pada Triwulan III telah disusun Peraturan Sekjen LPSK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Program Rehabilitasi Psikososial bagi Petugas LPSK. Persekjen tersebut dirancang sebagai dokumen pelengkap pedoman umum pelaksanaan program rehabilitasi psikososial, yang

mengatur tata cara penilaian pemberian program psikososial bagi korban TP sebagai bahan pertimbangan bagi LPSK

- d. Pada Triwulan IV, LPSK telah melaksanakan Peluncuran *Grand Strategy* Program Rehabilitasi Psikososial Bagi Korban Tindak Pidana (Mou) Antara LPSK dengan beberapa Institusi Mitra Program Rehabilitasi Psikososial.

Tabel B.18

Program Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial
Korban Tindak Pidana

No	Kode Rincian Output	PN/Tematik (PN LPSK/Tahun 2023)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana Triwulan II	4,500,000,000	195,805,252	4,35%	1 Rekomendasi Kebijakan	Tersusunnya Road Map Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana	5,1%
2	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana Triwulan II	4,500,000,000	473,498,419	10,52%	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rancangan Pedoman Umum	12,4%
3	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana Triwulan III	4,500,000,000	1,731,237,969	38,47	1 Peraturan Asesmen Program Rehabilitasi Psikososial	1 Peraturan Sekjen LPSK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Asesmen Program Rehabilitasi Psikososial bagi Petugas LPSK.	40,4%
4	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana Triwulan IV	4,500,000,000	3,386,906,251	75,26%	1 rekomendasi kebijakan yang telah disosialisasikan	1 rekomendasi Grand Strategy Program Rehabilitasi Psikososial Bagi Korban Tindak Pidana (Mou) Antara LPSK dengan beberapa Institusi Mitra Program Rehabilitasi Psikososial.	99,4%

2. Pada Program Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) memiliki output strategis berupa penambahan jumlah anggota Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban), yang dilaksanakan melalui proses sosialisasi, diklat, dan pengukuhan Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) dengan masyarakat.

Kegiatan Program Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) di uraikan sebagai berikut:

- a. Pada triwulan I, Pelaksanaan kegiatan SSK pada Januari dan Februari tahun 2023 difokuskan untuk penyusunan rencana kerja Sekretariat SSK untuk tahun 2023 dan pedoman mekanisme kerja dan teknis koordinasi SSK dengan unit kerja di lingkungan LPSK dan Perwakilan LPSK. Pada Maret 2023 telah dilaksanakan Bimtek SSK di Bandung dengan total peserta 90 orang.

Keseluruhan peserta merupakan pendaftar yang belum dapat mengikuti Bimtek pada 2022 karena keterbatasan kuota peserta saat itu. Pada triwulan II direncanakan akan dilaksanakan sosialisasi dan bimtek SSK di wilayah Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Sumatera Barat untuk menjaring anggota SSK baru.

- b. Pada triwulan II, LPSK telah melaksanakan sosialisasi program Sahabat Saksi dan Korban (SSK) dalam bentuk sarasehan budaya di kota Pontianak (23 Mei 2023), *workshop* perlindungan saksi dan korban bersama Kongres Advokat Indonesia (17 Juni 2023), dan lomba konten video. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan anggota aktif SSK di Yogyakarta juga diselenggarakan di kota Yogyakarta (13-16 April) untuk memantau dan mengevaluasi aktivitas relawan SSK dalam mendukung tugas dan wewenang LPSK.
- c. Pada triwulan III telah dilaksanakan Diklat Calon Anggota SSK di kota Pontianak dan telah menjaring sebanyak 99 orang peserta. Kegiatan Diklat akan dirampungkan pada triwulan IV di kota Manado (3-6 Oktober), Padang (10-13 Oktober), dan Ambon (segera). Selain itu, pada akhir 2023 direncanakan akan diselenggarakan acara pengukuhan anggota SSK angkatan II yang dinyatakan lulus diklat.
- d. Pada Triwulan IV, Selama periode Oktober – Desember 2023, 547 SSK yang dikukuhkan dari 7 wilayah terus aktif melakukan penjangkauan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana. Begitupun dengan SSK dari wilayah Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah yang mengikuti diklat di wilayah Sulawesi Utara pada 2023 telah aktif melakukan penjangkauan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana. Berdasarkan catatan pada Oktober - Desember 2023 terdapat 174 aktivitas SSK dalam bentuk informasi, konsultasi, pengajuan permohonan dan penugasan. Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh SSK pada periode Oktober – Desember 2023 tercatat penambahan 8 aktivitas. Sosialisasi dan diseminasi dilakukan dalam bentuk diskusi, dialog dan penyuluhan

Tabel B.19
Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban
(Sahabat Saksi dan Korban)

No	Kode Rincian Output	PN/Tematik (PN LPSK/Tahun 2023)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1	002	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) Triwulan I	9,429,625,000	782,715,540	8,3%	650 orang	65 Orang	13,8%
2	002	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) Triwulan II	9,429,625,000	3,035,846,999	32,19%	650 orang	800 Orang	93,8%
3	002	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) Triwulan III	9,429,625,000	5,920,440,114	62,79%	650 orang	1127 Orang	99,8%
4	002	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) Triwulan IV	9,429,625,000	8,563,896,874	90,82%	650 orang	1706 Orang	99,4%

3. Pada Program Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memiliki output strategis berupa perlindungan yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, yang dilaksanakan melalui Kerjasama antara Pemerintah dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di seluruh Provinsi, dengan uraian kegiatan per triwulan sebagai berikut:
- a. Pada Triwulan 1, Jumlah Terlindung TPKS yang merupakan luncuran (carry-over) dari tahun 2022 dan 2021 ada sebanyak 489 orang. Sepanjang triwulan I tahun 2023 (1 Januari s.d. 31 Maret 2023), jumlah Terlindung yang baru ada sebanyak 100 orang, sehingga total Terlindung TPKS keseluruhan ada sebanyak 589 orang. Dalam periode yang sama, sebanyak 216 orang Terlindung diputuskan untuk dihentikan perlindungannya oleh LPSK, sehingga jumlah Terlindung TPKS aktif pada triwulan I tahun 2023 ada sebanyak 373 orang.
 - b. Pada Triwulan II, Terlindung tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berstatus aktif menerima layanan LPSK sebanyak 543 orang. Jumlah ini melampaui target capaian dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 50% dari jumlah Terlindung saat ini, yaitu menjadi sebanyak 271 orang.
 - c. Pada Triwulan III, Terlindung tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berstatus aktif menerima layanan LPSK sebanyak 701 orang. Jumlah ini melampaui target capaian dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 25% dari jumlah Terlindung saat ini, yaitu menjadi sebanyak 175 orang

- d. Pada Triwulan IV, Terlindung tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berstatus aktif menerima layanan LPSK sebanyak 385 orang.

Tabel B.20

Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Kode Rincian Output	PN/Tematik (PN LPSK/Tahun 2023)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progress Capaian Output
1	U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Triwulan I	9,593,140,000	939,792,082	9,8%	166 orang	35 Orang	20,4%
2	U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Triwulan II	9,593,140,000	4,554,003,568	47,47%	166 orang	239 Orang	95,4%
3	U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Triwulan III	9,593,140,000	7,171,150,083	74,75%	166 orang	360 Orang	99,4%
4	U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Triwulan IV	9,593,140,000	9,135,737,967	95,23%	166 orang	655 Orang	99,4%

B.4.1 Pengungkapan Capaian Output per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diklasifikasikan dalam 1 fungsi. Berikut ini disampaikan capaian output utama per fungsi APBN sebagai berikut :

Tabel B.21

Pengungkapan Capaian Output per Fungsi APBN
Ketertiban dan Keamanan (03)

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	009	Layanan Perlindungan Darurat dan Proaktif	1.326.445.000	1.310.818.476	99,00	50	266	Orang	532
2	010	Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK	2.561.067.000	2.515.430.607	99,00	40	40	Orang	100
3	U01	Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban	12.958.514.000	12.942.505.468	99,00	345	7641	Orang	2215
4	U02	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	6.395.390.000	6.364.375.992	99,00	107	244	Orang	228
5	U03	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.766.336.000	2.751.971.946	99,00	48	75	Orang	156
6	U04	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat	6.083.688.000	6.083.452.766	100,00	102	1179	Orang	1156
7	U05	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana TPPO	3.934.240.000	3.932.753.631	99,00	67	508	Orang	758
8	U07	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Penyiksaan	3.464.480.000	3.464.378.109	100,00	59	349	Orang	591
9	U08	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum Lainnya	6.462.470.000	6.461.798.103	99,00	113	336	Orang	297
10	001	Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	158.866.331.000	158.766.570.455	99,00	12	12	Layanan	100
11	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana	4.500.000.000	4.498.423.833	99,00	1	1	Rekomendasi kebijakan	100
12	U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	9.593.140.000	9.550.788.948	99,00	166	1204	Orang	725
13	002	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban)	9.429.625.000	9.425.210.783	99,00	650	791	Orang	121
14	001	Kerja sama Antar Lembaga	400.000.000	398.808.366	99,00	6	6	Dokumen	100
15	001	Standar Layanan Perlindungan Saksi dan Korban	600.000.000	596.968.363	99,00	8	8	NSPK	100
16	963	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	79.800.000	79.800.000	100,00	1	1	Layanan	100
17	964	Layanan Pengembangan Sistem	383.707.000	383.372.035	99,00	1	1	Layanan	100
18	968	Perangkat TIK	35.000.000	33.987.876	97,00	5	5	Unit	100
19	966	Pemeliharaan TIK	954.078.000	952.515.455	99,00	10	10	Unit	100
20	967	Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	76.272.000	76.271.654	100,00	64	64	Unit	100
21	956	Layanan BMN	475.318.000	403.351.371	85,00	5	5	Layanan	100
22	957	Layanan Hukum	624.478.000	624.156.365	99,00	5	5	Layanan	100
23	958	Layanan Hubungan Masyarakat	994.396.000	990.652.154	99,00	12	12	Layanan	100
24	959	Layanan Protokol	327.978.000	327.915.442	99,00	12	12	Layanan	100
25	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	456.692.000	456.196.450	99,00	3	3	Layanan	100
26	962	Layanan Umum	707.919.000	706.929.276	99,00	3	3	Layanan	100
27	969	Layanan Bantuan Hukum	347.000.000	346.938.687	99,00	4	4	Layanan	100
28	994	Layanan Perkantoran	55.386.897.000	54.221.785.214	98,00	2	2	Layanan	100
29	951	Layanan Sarana Internal	437.089.000	431.026.660	98,00	20	20	Unit	100
30	971	Layanan Prasarana Internal	127.911.000	127.911.000	100,00	10	10	Unit	100
31	954	Layanan Manajemen SDM	1.224.792.000	1.186.135.673	97,00	320	425	Orang	133
32	996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	460.988.000	460.986.573	100,00	500	405	Orang	81
33	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.435.037.000	1.434.987.673	99,00	3	3	Dokumen	100
34	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	619.368.000	619.332.119	99,00	7	7	Dokumen	100
35	955	Layanan Manajemen Keuangan	498.255.000	497.294.930	99,00	3	3	Dokumen	100
36	961	Layanan Reformasi Kinerja	403.868.000	366.394.156	91,00	1	1	Dokumen	100
37	965	Layanan Audit Internal	451.119.000	451.102.004	100,00	13	13	Dokumen	100
38	974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	384.706.000	384.704.129	100,00	2	2	Dokumen	100

B.4.2 Pengungkapan Capaian Output per Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Prioritas

Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing PN adalah sebagai berikut:

B.4.3 Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam transformasi pelayanan publik

Pelaksanaannya di antaranya melalui 3 (tiga) Rincian Output program prioritas, Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana, Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp23.522.765.000,00 dan realisasi sebesar Rp23.474.423.564,00 (99,79%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.22

Tabel Capaian Output Strategis Lainnya

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1.	U06	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	9.593.140.000	9.550.788.948	99,56	166	1204	Orang	725,30
2.	001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana	4.500.000.000	4.498.423.833	99,96	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00
3.	002	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban)	9.429.625.000	9.425.210.783	99,95	650	791	Orang	121,69
Jumlah			23.522.765.000	23.474.423.564	99,79				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) NERACA

Audited

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp281.213.181,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp281.213.181,00 dan Rp1.115.626.315,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.1
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Lancar	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	15.366.818	893.242.834
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	3.233.600	104.339.832
4	Persediaan	262.612.763	118.043.649
	Total	281.213.181	1.115.626.315

Kas di Bendahara
Pengeluaran Nihil

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

Seluruh transaksi baik oleh Bendahara Pengeluaran LPSK maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menggunakan rekening yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I dan secara periodik telah menyampaikan laporan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp15.366.818,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15.366.818,00 dan Rp893.242.834,00. Saldo Rp15.366.818,00 merupakan uang yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Penelaahan Permohonan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sampai dengan tanggal Neraca.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.2
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Bendahara Pengeluaran LPSK	-	893.242.834
Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Penelaahan Permohonan	13.707.151	-
Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban	1.659.667	-
Total Kas Lainnya dan Setara Kas	15.366.818	893.242.834

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp13.707.151 pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Penelaahan permohonan adalah saldo pajak yang belum disetorkan sampai dengan tanggal neraca. Pembayaran pajak tersebut dilakukan pada tanggal 8 Januari 2024 dengan nomor NTPN 9891044390051003, dengan rincian dan bukti setor terlampir pada lampiran 1.

Sedangkan, Kas Lainnya dan Setara Kas Rp1.659.667 pada Bendahara Pembantu Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban merupakan tagihan rumah sakit yang masih harus dibayarkan. Tagihan tersebut dibayarkan pada tanggal 6 Februari 2024 dan bukti setor terlampir pada lampiran 2.

Belanja Dibayar
Dimuka (*prepaid*)
Rp3.233.600,00

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.233.600,00 dan Rp104.339.832,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.3
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2023

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Belanja Barang Yang Dibayar Dimuka	3.233.600	104.339.832
Total Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	3.233.600	104.339.832

Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (*prepaid*) sebesar Rp3.233.600,00 merupakan kelebihan pembayaran untuk tagihan rumah sakit oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Kelebihan pembayaran

tersebut dijadikan pengurang untuk tagihan rumah sakit tersebut di periode tagihan selanjutnya.

Persediaan
Rp262.612.763,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp262.612.763,00 dan Rp118.043.649,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.4
Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Persediaan	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	259.732.763	118.043.649
Persediaan Lainnya	2.880.000	-
Jumlah	262.612.763	118.043.649

Dari nilai persediaan pada LPSK di tahun 2023 sebesar Rp262.612.763,00, tidak terdapat persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 karena seluruhnya telah digunakan.

Rincian Persediaan berupa Barang Konsumsi senilai Rp259.732.763,00 dapat dilihat pada Lampiran 3.

Persediaan lainnya senilai Rp2.880.000 merupakan persediaan berupa *drum toner*.

Semua jenis persediaan tersebut diatas pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp394.388.982.384,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp394.388.982.384,00 dan Rp235.868.408.195,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.5
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Tanah	115.257.138.280	88.179.767.280
2	Peralatan dan Mesin	112.687.705.297	62.428.957.557
3	Gedung dan Bangunan	227.740.585.177	92.364.012.422
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.690.792	8.690.792
5	Aset Tetap Lainnya	82.720.632	82.720.632
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.131.310.500	46.663.799.586
Nilai Perolehan		458.908.150.680	289.727.948.269
7	Akumulasi Penyusutan	(64.519.168.296)	(53.859.540.074)
Nilai Buku		394.388.982.382	235.868.408.195

Tanah
Rp115.257.138.280,00

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki LPSK per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp115.257.138.280,00 dan Rp88.179.767.280,00. Mutasi pada aset Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	88.179.767.280
Mutasi Tambah:	
- Transfer Masuk	27.077.371.000
- Pembelian	-
- Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Jumlah Mutasi Tambah	27.077.371.000
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	115.257.138.280

Transaksi penambahan nilai Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Penyerahan 1 persil tanah seluas 15.115 m² dari Kementerian Keuangan berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-52/KN/2023 pada tanggal 6 September 2023 sebesar Rp24.300.537.000,00;
- Reklasifikasi masuk dari KPK atas alih status 2 persil tanah, yang berlokasi di Kota Depok Jawa Barat seluas 157 m² dan di Jakarta Selatan seluas 127 m² dengan nomor BAST BA-07/EK.11/26/09/2023 tanggal 19 September 2023 senilai Rp2.776.834.000,00.

Peralatan dan Mesin
Rp12.687.705.297,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp112.687.705.297,00 dan Rp62.428.957.557,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.003.301.211,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp 61.684.404.088,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	62.428.957.557
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	27.815.748.415
- Transfer Masuk	-
- Hibah	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	47.816.185.903
- Pengembangan melalui KDP	-
- Pengembangan Nilai Aset	128.000.000
- Reklasifikasi Masuk	149.019.550
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	1.973.745
- Perolehan Lainnya	2.744.399.902
- Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	4.649.400
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	13.918.920
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
Jumlah Mutasi Tambah	78.673.895.835
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Reklasifikasi Keluar	(294.929.920)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	(6.088.501.784)
- Koreksi Pencatatan	(22.031.716.391)
- Koreksi Migrasi SAKTI	-
- Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Kurang	(28.415.148.095)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	112.687.705.297
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(51.003.301.211)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	61.684.404.088

Transaksi Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp78.673.895.837,00 adalah sebagai berikut:

- Rincian Pembelian sebesar Rp27.815.748.415,00 terdapat pada Lampiran 4.1;

- Rincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp47.816.185.903,00 terdapat pada Lampiran 4.2;
- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp128.000.000,00 merupakan pengembangan aset berupa *microphone conferencel*;
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp149.019.550,00 merupakan nilai *note book* sebanyak 7 unit senilai Rp146.369.550,00 dan net book senilai Rp2.650.000,00;
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp1.973.745,00 adalah rekalsifikasi persediaan berupa *Otoscope Halogen Lamp*;
- Rincian perolehan lainnya sebesar Rp2.744.399.902,00 terdapat pada Lampiran 4.3;
- Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra sebesar Rp4.649.400,00 terdiri atas reklasifikasi Meja Kayu senilai Rp4.050.000,00 dan *Loudspeaker* senilai Rp599.400;
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp13.918.920 merupakan Aset berupa *jammer* yang sebelumnya dicatat sebagai Belanja Bahan.

Transaksi Pengurangan Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.415.148.095,00 adalah sebagai berikut:

- Rincian Reklasifikasi Keluar sebesar Rp294.929.920,00 terdiri atas Televisi senilai Rp20.000.000,000, *Note Book* senilai Rp 248.240.000,00, *Public Address Branch Exchange* (PABX) senilai Rp26.090.520,00 dan *Loudspeaker* senilai Rp599.400,00;
- Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan Sebesar Rp6.088.501.784,00 sesuai dengan dapat dilihat pada Lampiran 5.1;
- Rincian Koreksi Pencatatan dari Peralatan dan Mesin ke KDP Sebesar Rp22.031.716.391,00 dapat dilihat pada Lampiran 5.2.

Gedung dan
Bangunan
Rp227.740.585.177,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 227.740.585.177,00 dan Rp92.364.012.422,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.507.176.293,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah Rp214.233.408.884,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	92.364.012.422
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	-
- Transfer Masuk	-
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	125.307.965.735
- Pengembangan Melalui KDP	137.282.010.249
- Reklasifikasi Masuk	810.056.000
- Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	-
- Pengembangan Nilai Aset	-
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	4.575.348.177
Jumlah Mutasi Tambah	360.339.392.583
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(113.025.494.681)
- Transfer Keluar	-
- Reklasifikasi Keluar	-
- Koreksi Pencatatan	(19.573.312.725)
- Penghentian dari Penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	(132.598.807.406)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	227.740.585.177
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(13.507.176.293)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	214.233.408.884

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp125.307.965.735,00 terdiri atas Penyelesaian Pembangunan Gedung P-4 Cibitung dengan NUP 6 sebesar Rp46.261.582.897,00 dan NUP 1 Rp79.046.382.838,00;
- Penambahan Pengembangan Melalui KDP Rp137.282.010.249,00 terdiri atas Pembangunan Gedung Kantor Permanen di LPSK Bekasi sebanyak 2 unit dengan nilai Rp132.580.183.851,00, Pembangunan Gedung Pos

Jaga Permanen Rp161.918.781,00. di LPSK Bekasi; Pembangunan Bangunan Rumah Genset sebanyak 2 unit yang berasal dari LPSK Pusat dan LPSK Bekasi dengan nilai Rp3.983.564.517,00, dan Pengembangan Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen dengan nilai Rp556.343.100,00;

- Penambahan Reklasifikasi Masuk senilai Rp810.056.000,00 terdiri atas reklasifikasi masuk dari KPK berupa Rumah Negara Golongan IIA dengan nilai Rp270.108.000,00 dan Apartemen dengan nilai Rp539.948.000,00;
- Koreksi Pencatatan Nilai Tambah Rp4.575.348.177,00 merupakan jurnal koreksi atas nilai Peralatan dan Mesin yang terdapat pada nilai Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Gedung P-4 Cibitung;
- Koreksi Pencatatan Nilai Kurang sebesar Rp113.025.494.681 terdiri atas pencatatan Gedung Kantor Permanen di LPSK Bekasi sebanyak 2 unit dengan nilai Rp109.517.623.172,00, Gedung Pos Jaga Permanen di LPSK Bekasi Rp161.918.781,00, bangunan rumah genset senilai Rp3.321.547.728,00 dan koreksi SPM dari belanja modal gedung dan bangunan menjadi Belanja pemeliharaan gedung senilai Rp24.405.000,00;
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp 19.573.312.725,00 terdiri atas koreksi tambah nilai dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp16.812.875.767,00 dan kesalahan catat atas Beban Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.760.436.958,00.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp8.690.792,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.690.792,00. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.690.792,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	8.690.792
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Masuk	-
- Pengembangan Nilai Aset	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	8.690.792
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(8.690.792)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Aset Tetap Lainnya
Rp82.720.632,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp82.720.632,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp82.720.632,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	82.720.632
Mutasi Tambah:	
- Koreksi Migrasi SAKTI	-
- Pembelian	-
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Mutasi Kurang:	
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	82.720.632
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	82.720.632

Aset tetap lainnya senilai Rp82.720.632,00 terdiri atas Monografi sebanyak 178 buah senilai Rp71.349.632,00 dan Buku lainnya sebanyak 88 *dummy* sebesar Rp11.371.000,00.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp3.131.310.500,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.131.310.500,00 dan Rp46.663.799.586,00.

Mutasi saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai perolehan per 31 Desember 2022	46.663.799.586
Mutasi Tambah:	
- Perolehan/Penambahan KDP	86.237.244.269
- Pengembangan KDP	-
- Koreksi Nilai KDP Bertambah	-
Jumlah Mutasi Tambah	132.901.043.855
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Nilai KDP Berkurang	-
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(129.769.733.355)
Jumlah Mutasi Kurang	(129.769.733.355)
Nilai buku per 31 Desember 2023	3.131.310.500

Transaksi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp86.237.244.269,00 merupakan proses Pembangunan Gedung P4 tahap 1 dan 2 sebesar Rp83.441.704.269,00 dan proses Pembangunan Laboratorium Pembinaan Karakter Pegawai LPSK sebesar Rp2.795.540.000,00;
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi sebesar Rp129.769.733.355 merupakan reklasifikasi terhadap gedung dan peralatan dan mesin pada proses Pembangunan Gedung P4 di Cibitung.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp64.519.168.296,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp64.519.168.296,00 dan Rp53.859.540.074,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.6
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Tanah	115.257.138.280	-	115.257.138.280
Peralatan dan Mesin	112.687.705.299	51.003.301.211	61.684.404.088
Gedung dan Bangunan	227.740.585.177	13.507.176.293	214.233.408.884
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.690.792	8.690.792	-
Aset Tetap Lainnya	82.720.632	-	82.720.632
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.131.310.500	-	3.131.310.500
Total	458.908.150.680	64.519.168.296	394.388.982.384

Aset Lainnya
Rp3.755.936.913,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.755.936.913,00 dan Rp327.969.064,00, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.7
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	4.681.402.268	2.010.973.575
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1.340.116.387	-
3	Aset Lain-Lain	7.095.373.227	1.006.871.443
	Nilai Perolehan	13.116.891.882	3.017.845.018
4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(9.360.954.969)	(2.689.875.954)
	Nilai Buku	3.755.936.913	327.969.064

Aset Tak Berwujud
Rp4.681.402.268,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.681.402.268,00 dan Rp2.010.973.575,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp2.270.694.304,00,

sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp2.410.707.964,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.010.973.575
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	88.823.000
- Transfer Masuk	-
- Pengembangan Nilai Aset	75.000.000
- Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	-
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.506.605.693
- Pengembangan Melalui KDP	-
- Perolehan Lainnya	-
Jumlah Mutasi Tambah	4.681.402.268
Mutasi Kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.681.402.268
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.270.694.304)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.410.707.964

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp88.823.000,00 merupakan pembelian software Ms.Office sebanyak 35 unit senilai Rp73.423.000,00 dan software vMix 4K/Software perangkat Audio pada Gedung LPSK senilai Rp15.400.000,00;
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp75.000.000,00 merupakan pengembangan aplikasi Simpelkan;
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp2.506.605.693,00 merupakan Penyelesaian KDP ATB-Data Center senilai Rp1.006.605.693,00 dan ATB-Simpusako senilai Rp1.500.000.000,00

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp1.340.116.387,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Terdapat Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.340.116.387,00. Jumlah tersebut merupakan RPATA per 31 Desember 2023 yang berasal dari dana Hibah.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut:

- RPATA untuk pembayaran Retensi pemeliharaan sebesar Rp85.116.387,00;
- Pembangunan laboratorium pembinaan karakter Ipsk (arsitektur lantai 1, mekanikal, elektrik dan *plumbing*) sebesar Rp280.000.000,00;
- Konstruksi pembangunan Laboraturium Pembinaan Karakter pegawai LPSK Rp975.000.000,00

Aset Lain – Lain
Rp7.095.373.227,00

C.3.3. Aset Lain – Lain

Nilai perolehan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.095.373.227,00 dan Rp1.006.871.443,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional LPSK. Aset tersebut dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap namun digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.095.373.227,00 sehingga nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan sebesar Rp5.112.562,00.

Mutasi nilai Aset Lain-Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.006.871.443
Mutasi Tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6.088.501.784
- Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	-
- Transaksi Normalisasi	-
Jumlah Mutasi Tambah	6.088.501.784
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-
- Penghapusan	-
Jumlah Mutasi Kurang	
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7.095.373.227
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(7.090.260.655)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.112.562

Terdapat penghentian aset dari penggunaannya sebesar Rp6.088.501.784,00 sesuai dengan surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: KEP-893/2.3.2.RT/LPSK/11/2023 tentang Perubahan Kondisi Barang Dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor, Peralatan Dan Mesin Pada Satuan Kerja Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang ditetapkan pada 9 November 2023, dengan rincian barang terlampir dalam surat Keputusan tersebut.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp9.360.954.969,00)*

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp9.360.954.969,00 dan Rp2.689.875.954,00. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain, dan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tersebut. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri atas:

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Lain - Lain	7.090.260.665	1.006.150.832
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	2.270.694.304	1.683.725.122
	Total	9.360.954.969	2.689.875.954

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp701.650.388,00*

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp701.650.388,00 dan Rp 2.322.685.974,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel C.8

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	687.943.237	2.322.685.974
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.707.151	-
	Total	701.650.388	2.322.685.974

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp687.943.237,00

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp687.943.237,00 dan Rp2.322.685.974,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam kurun waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri atas:

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	7.104.000
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	197.393.583	1.426.418.775
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	490.549.654	889.163.199
Total Utang Kepada Pihak Ketiga	687.943.237	2.322.685.974

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp197.393.583,00 terdiri atas:

- Pembayaran Listrik Kantor LPSK Bulan Januari 2024 atas pemakaian Desember 2023 sebesar Rp160.686.573,00;
- Pembayaran Retribusi Sampah Bulan Desember 2023 sebesar Rp1.356.000,00;
- Tagihan Telepon Bulan Januari 2024 atas pemakaian Desember 2023 sebesar Rp3.022.799,00;
- Tagihan Indihome Bulan Januari 2024 atas pemakaian Desember 2023 sebesar Rp8.231.558,00;
- Tagihan Kartu Halo Januari 2024 atas pemakaian Desember 2023 sebesar Rp9.889.003,00;
- Tagihan Air Pam Bulan Januari atas pemakaian Desember 2023 sebesar Rp8.647.325,00;
- Tagihan Air Pam Bulan April sebesar Rp5.560.325,00

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp490.549.654,00 terdiri atas tagihan rumah sakit yang belum dibayarkan sebesar Rp1.659.667,00 serta tagihan rumah sakit sebesar Rp3.233.600,00 akibat kesalahan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro PHSK dan Pembayaran RPATA untuk pengerjaan Laboratorium Pembinaan Karakter pegawai

LPSK senilai Rp485.656.387,00 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- Nomor BAST BA-0429/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 nomor SPP 00008T tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp74.240.000,00;
- Nomor BAST BA-0426/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 nomor SPP 00009T tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp326.300.000,00;
- Nomor BAST BA-0441/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 nomor SPP 00024T tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp85.116.387,00.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp13.707.151,00*

C.4.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Uang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.707.151,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Penelaahan Permohonan namun belum disetorkan hingga tanggal 31 Desember 2023. Pajak tersebut telah disetorkan pada 8 Januari 2024 dengan nomor NTPN 9891044390051003.

*Ekuitas
Rp397.724.482.088,00*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp397.724.482.088,00 dan Rp234.989.317.600,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
LAPORAN OPERASIONAL
(L O)**

Audited

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
Rp(158.859.260.155,00)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp158.859.260.155,00 dan minus Rp119.175.247.989,00. Jumlah Tahun 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp22.701.384,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar minus Rp158.881.961.539,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp22.701.384,00

D.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.701.384,00 dan Rp0. Rincian PNBP Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.1

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	22.701.384	0	22.701.384	100,00
Jumlah	22.701.384	0	22.701.384	100,00

Terdapat pendapatan yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak di tahun anggaran 2023 berupa denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Videotron atas pekerjaan pada TA 2022 sebesar Rp.22.701.384,00.

Beban Operasional
Rp158.881.961.53900

D.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp158.881.961.539,00 dan Rp119.175.247.989,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.2

Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	23.658.245.798	18.595.364.603	5.062.881.195	27,23
Beban Persediaan	1.562.757.419	1.485.658.534	77.098.885	5,19
Beban Barang dan Jasa	53.442.353.117	40.764.401.034	12.677.952.083	31,10
Beban Pemeliharaan	4.065.198.709	3.101.434.186	963.764.523	31,07
Beban Perjalanan Dinas	58.826.884.520	47.974.033.341	10.852.851.179	22,62
Beban Penyusutan dan Amortisasi	17.326.521.976	7.254.356.291	10.072.165.685	138,84
Jumlah	158.881.961.539	119.175.247.989	39.706.713.550	33,32

Perbandingan realisasi beban operasional pada Laporan Operasional Tahun 2023 dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama terdapat selisih sebesar minus Rp1.967.430.669,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.3

Perbandingan Realisasi Beban Operasional

Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Pegawai	23.658.245.798,00	23.665.349.798,00	(7.104.000,00)
Beban Persediaan	1.562.757.419,00	1.709.300.278,00	(146.542.859,00)
Beban Barang dan Jasa	53.442.353.117,00	51.012.880.317,00	2.429.472.800,00
Beban Pemeliharaan	4.065.198.709,00	4.046.429.709,00	18.769.000,00
Beban Perjalanan Dinas	58.826.884.520,00	59.154.048.792,00	(327.164.272,00)
Jumlah	141.555.439.563,00	139.588.008.894,00	1.967.430.669,00

Beban Pegawai
Rp23.658.245.798,00

D.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp23.658.245.798,00 dan Rp18.595.364.603,00. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.4

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %	
			Rupiah	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.781.317.451	6.434.914.221	1.346.403.230	20,92
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.418.199.882	6.493.740.630	924.459.252	14,24
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.144.240.262	-	1.144.240.262	100,00
Beban Lembur	196.567.000	180.813.000	15.754.000	8,71
Beban Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	7.117.921.203	5.485.896.752	1.632.024.451	29,75
Jumlah	23.658.245.798	18.595.364.603	5.062.881.195	27,23

Jika realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp7.104.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.5
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Gaji dan Tunjangan PNS	7.781.317.451,00	7.788.421.451,00	(7.104.000,00)
Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	7.418.199.882,00	7.418.199.882,00	-
Gaji dan Tunjangan PPPK	1.144.240.262,00	1.144.240.262,00	-
Lembur	196.567.000,00	196.567.000,00	-
Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	7.117.921.203,00	7.117.921.203,00	-
Jumlah	23.658.245.798,00	23.665.349.798,00	(7.104.000,00)

Selisih Beban Pegawai menurut LO dan LRA sebesar minus Rp7.104.000,00 merupakan utang atas belanja Uang Makan PNS tahun 2022 yang dibayarkan di tahun 2023.

Beban Persediaan
Rp1.562.757.419,00

D.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.562.757.419,00 dan Rp1.485.658.534,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.6
Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.562.757.419	1.483.092.628	79.664.791	5,37
Beban Persediaan Lainnya	-	2.565.906	(2.565.906)	(100,00)
Jumlah	1.562.757.419	1.485.658.534	77.098.885	5,19

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.709.300.278,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp1.562.757.419,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.7

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan

Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Persediaan Konsumsi	1.562.757.419,00	1.709.300.278,00	(146.542.859,00)
Jumlah	1.562.757.419,00	1.709.300.278,00	(146.542.859,00)

Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan pada Laporan Operasional merupakan pemakaian Persediaan selama Tahun 2023. Selain itu terkait Belanja barang persediaan konsumsi direalisasikan dengan akun Belanja Barang dan Jasa.

*Beban Barang dan Jasa
Rp53.442.353.117,00*

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp53.442.353.117,00 dan Rp40.764.401.034,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.8

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Keperluan Perkantoran	14.986.603.602,00	14.361.371.837,00	625.231.765,00	4,35
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	612.700.673,00	406.002.470,00	206.698.203,00	50,91
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	261.018.500,00	176.518.008,00	84.500.492,00	47,87
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	636.322.000,00	438.920.000,00	197.402.000,00	44,97
Beban Barang Operasional Lainnya	1.525.599.999,00	835.304.200,00	690.295.799,00	82,64
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	258.117.911,00	380.674.749,00	(122.556.838,00)	(32,19)
Beban Bahan	6.040.893.751,00	4.306.396.060,00	1.734.497.691,00	40,28
Beban Honor Output Kegiatan	3.844.937.500,00	2.465.710.000,00	1.379.227.500,00	55,94
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.569.296.144,00	4.162.202.510,00	(592.906.366,00)	(14,25)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	9.500.000,00	-	9.500.000,00	100,00
Beban Langganan Listrik	1.961.100.163,00	1.481.666.764,00	479.433.399,00	32,36
Beban Langganan Telepon	37.313.590,00	57.758.018,00	(20.444.428,00)	(35,40)
Beban Langganan Air	107.831.126,00	64.762.840,00	43.068.286,00	66,50
Beban Sewa	4.000.593.756,00	3.765.754.937,00	234.838.819,00	6,24
Beban Jasa Profesi	2.340.928.459,00	1.472.392.385,00	868.536.074,00	58,99
Beban Jasa Lainnya	12.996.495.943,00	6.301.736.743,00	6.694.759.200,00	106,24
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	249.600.000,00	-	249.600.000,00	100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	64.999.513,00	(64.999.513,00)	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	22.230.000,00	(18.730.000,00)	(84,26)
Jumlah	53.442.353.117	40.764.401.034	12.677.952.083	31,10

Jika realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp2.429.472.800,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.9

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Keperluan Perkantoran	14.986.603.602	14.746.079.617	240.523.985
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	612.700.673	612.700.673	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	261.018.500	269.423.800	(8.405.300)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	636.322.000	636.322.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	1.525.599.999	1.525.599.999	-
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	258.117.911	267.108.911	(8.991.000)
Beban Bahan	6.040.893.751	6.056.475.471	(15.581.720)
Beban Honor Output Kegiatan	3.844.937.500	3.844.937.500	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.569.296.144	3.569.996.444	(700.300)
Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	9.500.000	9.500.000	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	249.600.000	249.600.000	-
Beban Langganan Listrik	1.961.100.163	1.946.809.555	14.290.608
Beban Langganan Telepon	37.313.590	37.709.530	(395.940)
Beban Langganan Air	107.831.126	107.238.326	592.800
Beban Sewa	4.000.593.756	4.003.713.275	(3.119.519)
Beban Jasa Profesi	2.340.928.459	2.340.928.459	-
Beban Jasa Lainnya	12.996.495.943	10.788.736.757	2.207.759.186
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	3.500.000	-	3.500.000
Jumlah	53.442.353.117	51.012.880.317	2.429.472.800

Detail penjelasan selisih Beban Barang dan Jasa menurut LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Beban Keperluan Perkantoran sebesar Rp240.523.985,00 dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel D.10
Rincian Selisih Beban Keperluan Perkantor
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	NILAI SELISIH
Beban dibayar dimuka	1.824.069
Hutang tahun 2023 berupa tagihan Indihome dan kartu halo pemakaian desember	18.120.561
Perpindahan beban Firewall Fortinet dan lisensi email security gedung Realisasi 2022	102.515.763
Hutang tahun 2022 berupa Tagihan Indihome bulan Desember 2022	(7.843.258,00)
koreksi atas pencatatan Gedung Kantor Permanen yang diperoleh dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Belanja Keperluan Perkantoran (521111)	322.560.000
Koreksi SPM menjadi Belanja Keperluan Perkantoran No dokumen 03878/PB/439005/2023	1.054.000
Koreksi SPM menjadi Belanja Keperluan Perkantoran No dokumen 03879/PB/439005/2023	149.850.000
Koreksi SPM menjadi Belanja Keperluan Perkantoran No dokumen 04155/PB/439005/2023	11.000.000
Koreksi SPM menjadi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan No Dokumen 230005033755 230181701005422	(359.156.550,00)
Koreksi SPM menjadi Belanja Keperluan Perkantoran No SPM 02222A	599.400
Jumlah	240.523.985

2. Selisih Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar minus Rp8.405.300,00 merupakan Hutang tahun 2022 berupa pengiriman dokumen melalui Pos.
3. Selisih Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar minus Rp8.991.000,00 merupakan Hutang 2022 berupa Tagihan Kartu halo kantor LPSK bulan Desember 2022.
4. Selisih Beban Bahan sebesar minus Rp15.581.720,00 terdiri dari:
 - a. Belanja Bahan berupa Jammer Portable 20M sebesar minus Rp13.918.920,00 menjadi Peralatan dan Mesin;
 - b. Utang 2022 berupa PIC Pembayaran Jamuan SMPL sebesar Rp115.000,00;
 - c. Utang Biro PHSK tahun 2022 sebesar minus Rp1.778.800,00

5. Selisih Beban Barang Non Operasional Lainnya sebesar minus Rp700.300,00 merupakan utang Barang Non Operasional Lainnya tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023;
6. Selisih Beban Langganan Listrik sebesar Rp14.290.608,00 merupakan selisih antara utang Belanja Langganan Listrik tahun 2022 sebesar minus Rp146.395.965,00 dengan utang Belanja Langganan Listrik tahun 2023 sebesar Rp160.686.573,00;
7. Selisih Beban Langganan Telepon sebesar minus Rp395.940,00 merupakan selisih antara utang Belanja Langganan Telepon tahun 2022 sebesar Rp3.418.739,00 dengan utang Belanja Langganan Telepon tahun 2023 sebesar Rp3.022.799,00
8. Selisih Beban Langganan Air sebesar Rp592.800,00 merupakan selisih antara utang Belanja Langganan air tahun 2022 sebesar Rp13.614.850,00 dengan utang Belanja Langganan air tahun 2023 sebesar Rp14.207.650,00;
9. Selisih Beban Sewa sebesar minus Rp3.119.519,00 merupakan utang Belanja Beban Sewa tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023;
10. Selisih Beban Jasa Lainnya sebesar Rp2.207.759.186,00 terdiri dari :
 - a. Utang Belanja Jasa Lainnya tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 sebesar minus Rp675.893.772,00;
 - b. Reklasifikasi Aset Tak Berwujud dari Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp656.556.000,00;
 - c. Koreksi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.227.096.958,00 menjadi Belanja Jasa Lainnya.
11. Selisih Beban Aset Ekstrakomtibel Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.500.000,00 merupakan belanja yang menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat dilakukan koreksi SPM menjadi Belanja Barang dikarenakan tidak terdapat pagu anggaran Belanja Barang.

*Beban Pemeliharaan
Rp4.065.198.709,00*

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.065.198.709,00 dan Rp3.101.434.186,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.11

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	709.328.931	825.161.210	-115.832.279	(14,04)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.729.165.393	2.209.106.130	520.059.263	23,54
Beban Pemeliharaan Lainnya	590.977.385	63.855.591	527.121.794	825,49
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	35.727.000	-	35.727.000	100,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	2.974.955	(2.974.955)	(100,00)
Beban Persediaan suku cadang	-	336.300	(336.300)	(100,00)
Jumlah	4.065.198.709	3.101.434.186	963.764.523	31,07

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp16.958.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.12

Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

URAIAN	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	709.328.931,00	707.972.931,00	1.356.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.729.165.393,00	2.747.479.393,00	(18.314.000,00)
Beban Pemeliharaan Lainnya	590.977.385,00	590.977.385,00	-
Jumlah	4.029.471.709,00	4.046.429.709,00	(16.958.000,00)

Selisih Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.356.000,00 merupakan Utang Tagihan retribusi sampah bulan Desember 2023.

Selisih Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp18.314.000,00 merupakan Utang Tunggakan Tagihan Operator Kendaraan Dinas Tahun 2022 yang dibayarkan pada Tahun 2023.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp58.826.884.520,00

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp58.826.884.520,00 dan Rp47.974.033.34100. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.13

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	39.947.184.322	32.303.420.702	7.643.763.620	23,66
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.219.043.612	2.577.154.065	(1.358.110.453)	(52,70)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.869.658.628	6.131.325.731	(1.261.667.103)	(20,58)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.512.550.271	4.034.256.786	2.478.293.485	61,43
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6.278.447.687	2.927.876.057	3.350.571.630	114,44
Jumlah	58.826.884.520	47.974.033.341	10.852.851.179	22,62

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar minus Rp537.944.272,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.14

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO	LRA	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	39.947.184.322	40.324.568.594,00	(377.384.272,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.219.043.612	1.379.603.612,00	(160.560.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.869.658.628	4.869.658.628,00	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.512.550.271	6.301.770.271,00	210.780.000,00
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6.278.447.687	6.278.447.687,00	-
Jumlah	58.826.884.520,00	59.154.048.792,00	(537.944.272,00)

Selisih Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp377.384.272,00 dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp160.560.000,00

merupakan utang Belanja Perjalanan Dinas biasa tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023.

Selisih Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp210.780.000,00 merupakan koreksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp17.326.521.976,00

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp17.326.521.976,00 dan Rp7.254.356.291,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.15

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.525.310.479	5.119.560.825	8.405.749.654	164,19
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.212.142.266	1.894.771.863	1.317.370.403	69,53
Beban Amortisasi Software	586.969.182	238.582.380	348.386.802	146,02
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.100.049	1.441.223	658.826	45,71
Jumlah	17.326.521.976	7.254.356.291	10.072.165.685	138,84

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp48.958.724,00

D.3. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp48.958.724,00 dan Rp133.237.784. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp48.958.724,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp27.999.999,00 dan Surplus/(Defisit) dari Pendapatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp20.958.725,00.

Surplus/(Defisit) dari
Pelepasan Aset Non
Lancar

Rp.27.999.999,00

D.3.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.999.999,00 dan Rp0,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2023 tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan peralatan dan mesin.

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp22.727.360,00

D.3.2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp20.958.725,00 dan Rp133.237.784,00.

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel D.16

Rincian Kegiatan Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	(483)	(54.540.908)	54.540.425	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(20.958.242)	(78.696.876)	57.738.634	(73,37)
Jumlah	(20.958.725)	(133.237.784)	112.279.059	(84,27)

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp20.958.725,00 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp483,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp20.958.242,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(L P E)**

Audited

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp234.989.317.600

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp234.989.317.600,00 dan Rp174.285.801.958,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp158.810.301.431)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar minus Rp158.810.301.431,00 dan minus Rp119.042.010.205,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi Yang Menambah/ (Mengurangi) Nilai Ekuitas
Rp60.163.307,00

E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp60.163.307,00 dan Rp1.099.000,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp60.163.307,00

E.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jumlah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp60.163.307,00 dan Rp1.099.000,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 merupakan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas dan Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi yang disebabkan pencatatan aset menggunakan akun Pendapatan Perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada aplikasi SAKTI dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28.320.609,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	31.842.698,00
Total	60.163.307,00

Transaksi Antar
Entitas Rp
Rp321.485.302.612

E.5. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp321.485.302.612,00 dan Rp179.744.426.847,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri atas:

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	294.241.499.614	179.877.664.631
2	Diterima dari Entitas Lain	(643.624.002)	(133.237.784)
3	Transfer Masuk	27.887.427.000	-
	Total	321.485.302.612	179.744.426.847

Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp294.241.499.164

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp294.241.499.614,00 dan Rp179.877.664.631,00. Jumlah per 31 Desember 2023 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai dengan 31 Desember 2023.

Diterima dari Entitas
Lain (Rp643.624.002)

E.5.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar minus Rp643.624.002,00 dan minus Rp133.237.784,00. Jumlah per 31 Desember 2023 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023.

Transfer Masuk
Rp27.887.427.000

E.5.3. Transfer Masuk

Jumlah Transfer Masuk per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.887.427.000,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2022 merupakan nilai buku aset yang ditransfer antar satuan kerja di lingkungan Pemerintahan berupa Tanah dan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyerahan 1 persil tanah seluas 15.115 m2 dari Kementerian Keuangan berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-52/KN/2023 pada tanggal 6 September 2023 sebesar Rp24.300.537.000,00;

2. Reklasifikasi masuk dari KPK atas alih status 2 persil tanah, yang berlokasi di Kota Depok Jawa Barat seluas 157 m2 dan di Jakarta Selatan seluas 127 m2 dengan nomor BAST BA-07/EK.11/26/09/2023 tanggal 19 September 2023 senilai Rp2.776.834.000,00;
3. Penerimaan Reklasifikasi Masuk dari KPK berupa Rumah Negara Golongan IIA dengan nilai Rp270.108.000,00;
4. Penerimaan Reklasifikasi Masuk dari KPK berupa Apartemen dengan nilai Rp539.948.000,00.

Ekuitas Akhir
Rp397.724.482.088

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing adalah sebesar Rp397.724.482.088,00 dan Rp234.989.317.600,00. Jumlah per 31 Desember 2023 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp398.426.132.476,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp701.650.388,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN
LAINNYA**

Audited

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**F.1. Pendapatan Dana Hibah**

Melalui *Exchange of Notes* tanggal 6 Maret 2002, 25 Oktober 2002, dan 5 November 2003, Pemerintah Republik Indonesia telah menerima hibah *Counterpart Fund Non Project Grant Aid* (CF-NPGA) dari Pemerintah Jepang sebesar Rp81.153.267.480. Dana hibah tersebut telah tersimpan dalam 3 (tiga) rekening khusus di Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Exchange Of Notes	No. Register Hibah	No. Rekening
1.	6 Maret 2002	70684001	510000270980
2.	25 Oktober 2002	70555701	510000275980
3.	5 November 2003	70492601	510000276980

Berdasarkan persetujuan Pemerintah Jepang melalui *Technical Arrangement on the Procedural Details* tanggal 15 Februari 2022, dana hibah tersebut dialokasikan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk digunakan dalam kegiatan *Strengthening the Governance System for the Protection of Witnesses and Victims through Information and Communication Technology*. Pencairan dana hibah akan dicairkan dengan jangka waktu yang semula dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 Februari 2023, kemudian diperpanjang menjadi tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan surat Pemerintah Jepang tanggal 16 September 2022 sebagai persetujuan atas permohonan perpanjangan waktu pencairan dari Sekretaris Jenderal LPSK nomor B-2490/2.3.1.PR/LPSK/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Rencana penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

Daftar Rencana Pengadaan

No	Nama Pengadaan	Nilai
1	Konsultan Perencana Basic Design Pembangunan P4 LPSK Tahap II CV Griya Loka	166.000.500
2	Konsultan Manajemen Konstruksi PT Virama Karya - Termin I	425.581.937
3	Konsultan Manajemen Konstruksi PT Virama Karya - Termin II	425.581.937

4	Konsultan Manajemen Konstruksi PT Virama Karya - Termin III	680.931.098
5	Konsultan Manajemen Konstruksi PT Virama Karya - Termin IV	510.698.324
6	Konsultan Manajemen Konstruksi PT Virama Karya - Termin V	85.116.387
7	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin I	15.195.311.900
8	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin II	1.985.572.992
9	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin III	5.531.149.248
10	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin IV	12.923.902.158
11	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin V	20.227.907.097
12	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin VI	6.097.886.291
13	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin VII	5.032.898.729
14	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin VIII	5.183.103.110
15	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan P4-LPSK Tahap II Termin IX	3.798.827.975
16	Pekerjaan Furnitur dan Interior Pembangunan P4 LPSK Tahap II Termin I	890.768.100
17	Pekerjaan Furnitur dan Interior Pembangunan P4 LPSK Tahap II Termin II	740.125.800
18	Pekerjaan Furnitur dan Interior Pembangunan P4 LPSK Tahap II Termin III	847.351.800

19	Pekerjaan Furnitur dan Interior Pembangunan P4 LPSK Tahap II Termin IV	809.706.150
20	Pekerjaan Furnitur dan Interior Pembangunan P4 LPSK Tahap II Termin V	943.196.625
21	Pekerjaan Furnitur dan Interior Pembangunan P4 LPSK Tahap II Termin VI	222.692.025
Total		82.724.310.183

Dari jumlah hibah sebesar Rp82.724.310.183,00 terealisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.619.411.771, sedangkan sisanya sebesar Rp65.533.855.229 akan digunakan pada tahun anggaran 2023. Rincian penggunaan dana hibah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Modal Hibah

(dalam rupiah)

No.	Jenis Tagihan	Uraian	No. SPP	Tanggal SPP	Nominal
1	172 - Pembayaran RPATA	Termin III CV Orland Lab	00009T	01/04/2024	Rp 326.300.000,00
2	172 - Pembayaran RPATA	Termin II CV Orland MEP	00008T	01/04/2024	Rp 74.240.000,00
3	172 - Pembayaran RPATA	SP-072/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 RAMU PRIMA PERSADA	03952T	29/12/2023	Rp 60.000.000,00
4	172 - Pembayaran RPATA	SP-069/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 KINTAKA DATA PRIMA	03945T	28/12/2023	Rp 132.696.000,00
5	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-057/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 LETMI ITB	03927T	21/12/2023	Rp 1.500.000.000,00
6	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-066/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 REDFOX INDONESIA	03926T	21/12/2023	Rp 600.000.000,00
7	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-071/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 REDFOX INDONESIA	03925T	21/12/2023	Rp 400.000.000,00
8	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-068/PPK-UDK-HP/LPSK/12/2023 KINTAKA DATA PRIMA	03916T	18/12/2023	Rp 142.500.000,00
9	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-062/PPK-UDK-HP/LPSK/11/2023 ORLAND	03883T	13/12/2023	Rp 120.000.000,00
10	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-060/PPK-UDK-HP/LPSK/11/2023 NEX SOLUSI TEKNOLOGI	03843T	12/11/2023	Rp 122.000.000,00
11	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-051/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 ORLAND	03735T	12/04/2023	Rp 1.300.000.000,00
12	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-048/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 LARE JEPARA RAYA	03734T	12/04/2023	Rp 622.500.000,00
13	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-053/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 NEX SOLUSI TEKNOLOGI	03733T	12/04/2023	Rp 80.000.000,00
14	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-052/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 NEX SOLUSI TEKNOLOGI	03732T	12/04/2023	Rp 80.000.000,00

Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023 (Audited)

15	231 - NON GAJI	RILTEKINDO MILIKI SOLUSI	03718T	12/04/2023	Rp	20.000.000,00
16	231 - NON GAJI	Perjadin	03617T	24/11/2023	Rp	21.453.446,00
17	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-007/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 PRO SISTIMATIKA AUTOMASI	03582T	22/11/2023	Rp	4.367.296.110,00
18	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-008/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 PRO SISTIMATIKA AUTOMASI	03578T	22/11/2023	Rp	525.064.410,00
19	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-050/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 BINSARADYA ABADI	03577T	22/11/2023	Rp	143.000.000,00
20	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-049/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 BINSARADYA ABADI	03576T	22/11/2023	Rp	121.000.000,00
21	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SPK-930.15/ULP/LPSK/11/2023 PRAKASITA AGUNG MANDIRI (Yello Hotel)	03575T	22/11/2023	Rp	54.450.000,00
22	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-056/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 JALA LINTAS MEDIA.	03381T	11/02/2023	Rp	90.900.000,00
23	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-055/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 JALA LINTAS MEDIA.	03380T	11/02/2023	Rp	163.800.000,00
24	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-054/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 JALA LINTAS MEDIA.	03379T	11/02/2023	Rp	126.000.000,00
25	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-051/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 ORLAND	03378T	11/02/2023	Rp	975.000.000,00
26	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-039/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 KINTAKA DATA PRIMA	03377T	11/02/2023	Rp	190.680.000,00
27	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-048/PPK-UDK-HP/LPSK/10/2023 LARE JEPARA RAYA	03316T	26/10/2023	Rp	622.500.000,00
28	231 - NON GAJI	CV DIAS DIKA DIMENSI	03290T	24/10/2023	Rp	31.788.000,00
29	231 - NON GAJI	NATA ASKAR CAKRAWALA	03217T	18/10/2023	Rp	27.330.000,00
30	231 - NON GAJI	LETMI ITB	03216T	18/10/2023	Rp	30.000.000,00
31	231 - NON GAJI	INTI KONSULTAN INDONESIA	03215T	18/10/2023	Rp	30.000.000,00
32	231 - NON GAJI	INTI KONSULTAN INDONESIA	03214T	18/10/2023	Rp	45.000.000,00
33	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-039/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 KINTAKA DATA PRIMA	03022T	10/06/2023	Rp	95.340.000,00
34	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-005/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	03015T	10/06/2023	Rp	273.974.693,00
35	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-04/CNI/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	03011T	10/05/2023	Rp	6.739.906.725,00
36	231 - NON GAJI	NALELA KARYA PERSADA	02924T	10/03/2023	Rp	3.500.000,00
37	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-011/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK	02922T	10/05/2023	Rp	155.000.000,00
38	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-039/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 KINTAKA DATA PRIMA	02781T	13/09/2023	Rp	95.340.000,00
39	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-043/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 TRI KREASI MANDIRI TEKNOLOGI	02702T	09/08/2023	Rp	50.068.000,00
40	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-044/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 TRI KREASI MANDIRI TEKNOLOGI	02699T	09/08/2023	Rp	73.423.000,00

Laporan Keuangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023 (Audited)

41	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-045/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 CV DIAS DIKA DIMENSI	02698T	09/08/2023	Rp 73.937.000,00
42	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-041/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 TRI KREASI MANDIRI TEKNOLOGI	02690T	09/08/2023	Rp 717.750.000,00
43	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-04/CNI/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	02659T	09/06/2023	Rp 6.739.906.726,00
44	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-042/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 BINSARADYA ABADI	02601T	09/04/2023	Rp 128.000.000,00
45	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-030/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 MEDIA TELEMATIKA JAYA	02514T	29/08/2023	Rp 1.450.000.000,00
46	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-032/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 REDFOX INDONESIA	02484T	22/08/2023	Rp 543.000.000,00
47	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-031/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 BINSARADYA ABADI	02483T	22/08/2023	Rp 285.000.000,00
48	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-027/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 MITRA CARPET INDONESIA	02482T	22/08/2023	Rp 308.315.000,00
49	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-029/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 RILTEKINDO MILIKI SOLUSI	02472T	22/08/2023	Rp 979.293.383,00
50	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-04/CNI/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	02447T	22/08/2023	Rp 6.739.906.726,00
51	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-040/PPK-UDK-HP/LPSK/8/2023 NATA ASKAR CAKRAWALA	02446T	22/08/2023	Rp 987.541.500,00
52	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-038/PPK-UDK-HP/LPSK/07/2023 ALZIKA RAKASA	02445T	22/08/2023	Rp 101.870.450,00
53	231 - NON GAJI	Perjadin	02370T	15/08/2023	Rp 1.318.000,00
54	231 - NON GAJI	BINSARADYA ABADI	02311T	08/08/2023	Rp 45.000.000,00
55	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-006/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	02308T	08/07/2023	Rp 455.190.000,00
56	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-005/PPK-UDK-P/LPSK/03/2023 ADD-07/PPK-UDK-P/LPSK/7/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	02306T	08/07/2023	Rp 1.095.898.771,00
57	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-036/PPK-UDK-P/LPSK/07/2023 ALZIKA RAKASA	02263T	08/04/2023	Rp 181.813.550,00
58	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-037/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 CV DIAS DIKA DIMENSI	02254T	08/04/2023	Rp 71.520.000,00
59	231 - NON GAJI	Perjadin	02237T	08/03/2023	Rp 92.437.230,00
60	231 - NON GAJI	Perjadin	02236T	08/03/2023	Rp 3.440.000,00
61	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-04/CNI/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 CYBER NETWORK INDONESIA	02226T	08/02/2023	Rp 6.739.906.726,00
62	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-034/PPK-UDK-HP/LPSK/7/2023 NATA ASKAR CAKRAWALA	02223T	08/02/2023	Rp 291.200.000,00
63	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-05/ITB/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 LETMI ITB	02220T	08/02/2023	Rp 24.875.000,00
64	231 - NON GAJI	CV DIAS DIKA DIMENSI	02219T	08/02/2023	Rp 16.200.000,00
65	231 - NON GAJI	CV DIAS DIKA DIMENSI	02218T	08/02/2023	Rp 14.700.000,00

66	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-011/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK	02122T	25/07/2023	Rp 155.000.000,00
67	231 - NON GAJI	CV DIAS DIKA DIMENSI	02064T	20/07/2023	Rp 8.640.000,00
68	231 - NON GAJI	CV DIAS DIKA DIMENSI	02057T	20/07/2023	Rp 32.200.000,00
69	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-022/PPK-UDK-HP/LPSK/06/2023 CV DIAS DIKA DIMENSI	01933T	07/07/2023	Rp 361.800.000,00
70	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-023/PPK-UDK-HP/LPSK/6/2023 CV DIAS DIKA DIMENSI	01922T	07/07/2023	Rp 242.400.000,00
71	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-021/PPK-UDK-HP/LPSK/6/2023 NATA ASKAR CAKRAWALA	01917T	07/06/2023	Rp 948.355.458,00
72	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-003/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 PLATINUM NETWORK INDONESIA	01847T	07/03/2023	Rp 7.559.789.023,00
73	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-004/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 PLATINUM NETWORK INDONESIA	01818T	07/03/2023	Rp 1.927.379.220,00
74	231 - NON GAJI	Perjadin	01722T	20/06/2023	Rp 210.780.000,00
75	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-05/ITB/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 LETMI ITB	01721T	19/06/2023	Rp 24.875.000,00
76	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-06/ITB/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 LETMI ITB	01720T	19/06/2023	Rp 50.000.000,00
77	231 - NON GAJI	CV DIAS DIKA DIMENSI	01707T	19/06/2023	Rp 8.260.000,00
78	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-018/PPK-UDK-HP/LPSK/5/2023 REDFOX INDONESIA	01705T	19/06/2023	Rp 930.000.000,00
79	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-019/PPK-UDK-HP/LPSK/05/2023 CV DIAS DIKA DIMENSI	01667T	14/06/2023	Rp 519.913.770,00
80	231 - NON GAJI	Perjadin	01584T	06/09/2023	Rp 7.845.000,00
81	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-05/ITB/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 LETMI ITB	01557T	06/08/2023	Rp 24.875.000,00
82	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-001/PPK-UDK-HP/LPSK/2/2023 MURAI BATU	01512T	06/06/2023	Rp 890.000.000,00
83	231 - NON GAJI	Perjadin	01404T	26/05/2023	Rp 4.677.000,00
84	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-017/PPK-UDK-HP/LPSK/4/2023 ACCESS LINTAS SOLUSI	01173T	05/12/2023	Rp 41.500.000,00
85	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-016/PPK-UDK-HP/LPSK/4/2023 ACCESS LINTAS SOLUSI	01171T	05/12/2023	Rp 42.300.000,00
86	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-012/PPK-UDK-HP/LPSK/3/2023 ACCESS LINTAS SOLUSI	01107T	05/04/2023	Rp 27.900.000,00
87	231 - NON GAJI	Perjadin	01086T	05/04/2023	Rp 3.250.120,00
88	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-015/PPK-UDK-HP/LPSK/3/2023 ACCESS LINTAS SOLUSI	01065T	05/02/2023	Rp 80.720.720,00
89	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-014/PPK-UDK-HP/LPSK/3/2023 ACCESS LINTAS SOLUSI	01063T	05/02/2023	Rp 80.720.720,00
90	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-013/PPK-UDK-HP/LPSK/3/2023 ACCESS LINTAS SOLUSI	01062T	05/02/2023	Rp 80.720.720,00
91	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-010/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 MYACICO GLOBAL INDONESIA	01036T	05/02/2023	Rp 51.900.000,00

92	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-06/ITB/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 LETMI ITB	01002T	17/04/2023	Rp 50.000.000,00
93	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	K-05/ITB/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 LETMI ITB	01001T	17/04/2023	Rp 24.875.000,00
94	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-002/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 MITRA PIRANTI SOLUSINDO	01000T	17/04/2023	Rp 238.702.247,00
95	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	SP-009/PPK-UDK-HP/LPSK/03/2023 ALZIKA RAKASA	00946T	17/04/2023	Rp 1.247.000.000,00
Jumlah					Rp 64.5G6.44G.444,00

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Pada Satuan Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan beberapa pejabat perbendaharaan melalui Surat Keputusan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPSK nomor SK- KEP-433/KPA/LPSK/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-001/KPA/LPSK/12/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun Anggaran 2023.
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran LPSK nomor KEP-434/KPA/LPSK/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KEP002/KPA/01/LPSK/2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Susunan Pejabat Pengelola Anggaran LPSK Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Budi Achmad Djohari
Pejabat Pembuat Komitmen Biro Administrasi	: Dian Herdiansah
Pejabat Pembuat Komitmen Biro PHSK	: Eni Nurtika
Pejabat Pembuat Komitmen Biro PP	: Mahari Is Subangun
Pejabat Pembuat Komitmen Biro HKH	: Achmad Soleh
Pejabat Pembuat Komitmen Dana Operasional Pimpinan	: Riani Anggraeni
Pejabat Pembuat Komitmen khusus Hibah dan	: Abadi Yanto
Pembangunan P-4 LPSK	
Bendahara Pengeluaran	: Bimo Setiajie
Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar	: Cita Mismiana
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	: Murniasih



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Audited

Abstract red and grey wavy lines flowing diagonally across the bottom right corner of the page.



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 439005
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	296,234,394,000	296,234,394,000	0
2	Belanja	295,227,463,906	295,227,463,906	0
3	Pengembalian Belanja	-985,964,292	-985,964,292	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	644,624,002	644,624,002	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 123
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 439005

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 20/06/24 4:01 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	643,624,002	643,624,002	0	0	133,237,784	133,237,784	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	643,624,002	643,624,002	0	0	133,237,784	133,237,784	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	643,624,002	643,624,002	0	0	133,237,784	133,237,784	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	296,234,394,000	294,241,499,614	(1,992,894,386)	99	245,533,225,000	179,877,664,631	(65,655,560,369)	73
1. Belanja Pegawai	24,835,247,000	23,665,349,798	(1,169,897,202)	95	18,627,093,000	18,588,260,603	(38,832,397)	100
2. Belanja Barang	116,525,915,000	115,922,659,096	(603,255,904)	99	93,589,061,000	93,517,538,924	(71,522,076)	100
3. Belanja Modal	154,873,232,000	154,653,490,720	(219,741,280)	100	133,317,071,000	67,771,865,104	(65,545,205,896)	51
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 123
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 439005

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 20/06/24 4:01 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	296,234,394,000	294,241,499,614	(1,992,894,386)	99	245,533,225,000	179,877,664,631	(65,655,560,369)	73
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

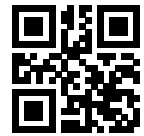
Keterangan :

FINAL

Jakarta, 20 Juni 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

BUDI ACHMAD DJOHARI
196502121986031002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	15,366,818	893,242,834	(877,876,016)	(98.28)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3,233,600	104,339,832	(101,106,232)	(96.90)
Persediaan	262,612,763	118,043,649	144,569,114	122.47
JUMLAH ASET LANCAR	281,213,181	1,115,626,315	(834,413,134)	(74.79)
ASET TETAP				
Tanah	115,257,138,280	88,179,767,280	27,077,371,000	30.71
Peralatan dan Mesin	112,687,705,297	62,428,957,557	50,258,747,740	80.51
Gedung dan Bangunan	227,740,585,177	92,364,012,422	135,376,572,755	146.57
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8,690,792	8,690,792	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	82,720,632	82,720,632	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,131,310,500	46,663,799,586	(43,532,489,086)	(93.29)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(64,519,168,296)	(53,859,540,074)	(10,659,628,222)	19.79
JUMLAH ASET TETAP	394,388,982,382	235,868,408,195	158,520,574,187	67.21
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,681,402,268	2,010,973,575	2,670,428,693	132.79
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1,340,116,387	0	1,340,116,387	0.00
Aset Lain-lain	7,095,373,227	1,006,871,443	6,088,501,784	604.70
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(9,360,954,969)	(2,689,875,954)	(6,671,079,015)	248.01
JUMLAH ASET LAINNYA	3,755,936,913	327,969,064	3,427,967,849	1,045.21
JUMLAH ASET	398,426,132,476	237,312,003,574	161,114,128,902	67.89
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	687,943,237	2,322,685,974	(1,634,742,737)	(70.38)
Utang Jangka Pendek Lainnya	13,707,151	0	13,707,151	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	701,650,388	2,322,685,974	(1,621,035,586)	(69.79)
JUMLAH KEWAJIBAN	701,650,388	2,322,685,974	(1,621,035,586)	(69.79)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	397,724,482,088	234,989,317,600	162,735,164,488	69.25
JUMLAH EKUITAS	397,724,482,088	234,989,317,600	162,735,164,488	69.25
JUMLAH EKUITAS	397,724,482,088	234,989,317,600	162,735,164,488	69.25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	398,426,132,476	237,312,003,574	161,114,128,902	67.89

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 20 Juni 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

BUDI ACHMAD DJOHARI

196502121986031002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 20/06/24 4:00 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22,701,384	0	22,701,384	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	22,701,384	0	22,701,384	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	22,701,384	0	22,701,384	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	23,658,245,798	18,595,364,603	5,062,881,195	27.227
Beban Persediaan	1,562,757,419	1,485,658,534	77,098,885	5.19
Beban Barang dan Jasa	53,442,353,117	40,764,401,034	12,677,952,083	31.101
Beban Pemeliharaan	4,065,198,709	3,101,434,186	963,764,523	31.075
Beban Perjalanan Dinas	58,826,884,520	47,974,033,341	10,852,851,179	22.622
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 20/06/24 4:00 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	17,326,521,976	7,254,356,291	10,072,165,685	138.843
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	158,881,961,539	119,175,247,989	39,706,713,550	33.318
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(158,859,260,155)	(119,175,247,989)	(39,684,012,166)	33.299
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	27,999,999	0	27,999,999	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	27,999,999	0	27,999,999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20,958,725	133,237,784	(112,279,059)	(84.27)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	20,958,725	133,237,784	(112,279,059)	(84.27)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	48,958,724	133,237,784	(84,279,060)	(63.255)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(158,810,301,431)	(119,042,010,205)	(39,768,291,226)	33.407
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(158,810,301,431)	(119,042,010,205)	(39,768,291,226)	33.407

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 20 Juni 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

BUDI ACHMAD DJOHARI
196502121986031002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:01 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	234,989,317,600	174,285,801,958	60,703,515,642	34.83
SURPLUS/DEFISIT-LO	(158,810,301,431)	(119,042,010,205)	(39,768,291,226)	33.41
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	60,163,307	1,099,000	59,064,307	5,374.37
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	60,163,307	1,099,000	59,064,307	5,374.37
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	321,485,302,612	179,744,426,847	141,740,875,765	78.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	162,735,164,488	60,703,515,642	102,031,648,846	168.08
EKUITAS AKHIR	397,724,482,088	234,989,317,600	162,735,164,488	69.25

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 20 Juni 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

BUDI ACHMAD DJOHARI

196502121986031002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 123
SATUAN KERJA : 439005

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 20/06/24 4:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,975,068,000	5,600,837,000	5,472,028,250	19,262,600	5,452,765,650	97.36	148,071,350
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,966,000	12,778,000	102,228	6,808	95,420	0.75	12,682,580
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	300,272,000	319,843,000	299,920,198	0	299,920,198	93.77	19,922,802
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	137,760,000	137,760,000	80,269,964	0	80,269,964	58.27	57,490,036
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	329,000,000	329,000,000	294,280,000	0	294,280,000	89.45	34,720,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	137,130,000	346,450,000	325,954,000	0	325,954,000	94.08	20,496,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	473,410,000	82,950,000	60,381,999	0	60,381,999	72.79	22,568,001
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	254,856,000	316,837,000	296,270,220	0	296,270,220	93.51	20,566,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,103,760,000	768,285,000	716,514,000	0	716,514,000	93.26	51,771,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	170,800,000	280,985,000	262,710,000	740,000	261,970,000	93.23	19,015,000
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	2,491,344,000	4,542,437,000	4,282,195,660	0	4,282,195,660	94.27	260,241,340
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	5,324,866,000	3,386,664,000	3,136,004,222	0	3,136,004,222	92.6	250,659,778
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	845,453,000	845,452,500	0	845,452,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	12,000	11,942	0	11,942	99.52	58
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	41,828,000	41,827,650	0	41,827,650	100	350
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	11,806,000	11,569,350	0	11,569,350	98	236,650
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	18,040,000	16,960,000	0	16,960,000	94.01	1,080,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	45,118,000	44,972,820	0	44,972,820	99.68	145,180
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	209,289,000	183,446,000	0	183,446,000	87.65	25,843,000
512211	Belanja Uang Lembur	582,000,000	258,000,000	182,383,000	0	182,383,000	70.69	75,617,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	42,000,000	14,184,000	0	14,184,000	33.77	27,816,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,216,476,000	6,153,800,000	6,040,143,466	0	6,040,143,466	98.15	113,656,534
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	1,085,075,000	1,077,777,737	0	1,077,777,737	99.33	7,297,263
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	22,510,708,000	24,835,247,000	23,685,359,206	20,009,408	23,665,349,798	95.37	1,169,897,202
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	19,935,954,000	14,748,411,000	14,746,079,617	0	14,746,079,617	99.98	2,331,383
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	478,500,000	613,104,000	612,700,673	0	612,700,673	99.93	403,327
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150,000,000	269,425,000	269,423,800	0	269,423,800	100	1,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,240,000	636,540,000	636,322,000	0	636,322,000	99.97	218,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	100,000,000	1,525,800,000	1,525,648,600	48,601	1,525,599,999	99.99	200,001
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,180,800,000	267,109,000	267,108,911	0	267,108,911	100	89
521211	Belanja Bahan	10,513,849,000	6,069,704,000	6,056,475,471	0	6,056,475,471	99.78	13,228,529
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,812,740,000	3,886,783,000	3,899,810,000	54,872,500	3,844,937,500	98.92	41,845,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,066,120,000	3,578,700,000	3,572,339,444	2,343,000	3,569,996,444	99.76	8,703,556
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	700,350,000	1,710,058,000	1,709,300,278	0	1,709,300,278	99.96	757,722
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	310,000,000	0	0	0	0	0	0
522111	Belanja Langganan Listrik	144,000,000	1,946,880,000	1,946,809,555	0	1,946,809,555	100	70,445

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 123
SATUAN KERJA : 439005

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 20/06/24 4:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	64,000,000	37,717,000	37,709,530	0	37,709,530	99.98	7,470
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	107,239,000	107,238,326	0	107,238,326	100	674
522141	Belanja Sewa	5,446,523,000	4,006,555,000	4,003,713,275	0	4,003,713,275	99.93	2,841,725
522151	Belanja Jasa Profesi	1,276,000,000	2,342,515,000	2,341,078,459	150,000	2,340,928,459	99.93	1,586,541
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,189,960,000	10,863,596,000	10,788,736,757	0	10,788,736,757	99.31	74,859,243
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	30,000,000	0	0	0	0	0	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,072,500,000	708,072,000	707,972,931	0	707,972,931	99.99	99,069
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,231,400,000	2,750,817,000	2,747,479,393	0	2,747,479,393	99.88	3,337,607
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,200,000	0	0	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	800,500,000	590,982,000	590,977,385	0	590,977,385	100	4,615
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,945,687,000	40,601,584,000	40,806,691,502	482,122,908	40,324,568,594	99.32	277,015,406
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,939,120,000	1,380,751,000	1,379,703,612	100,000	1,379,603,612	99.92	1,147,388
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,509,528,000	4,883,890,000	4,871,998,628	2,340,000	4,869,658,628	99.71	14,231,372
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,181,288,000	6,453,357,000	6,327,079,747	25,309,476	6,301,770,271	97.65	151,586,729
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2,836,050,000	6,283,726,000	6,612,064,843	333,617,156	6,278,447,687	99.92	5,278,313
	JUMLAH BELANJA BARANG	116,060,309,000	116,272,815,000	116,573,962,737	900,903,641	115,673,059,096	100.26	599,755,904
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,321,357,000	7,073,706,000	6,998,988,739	33,208,545	6,965,780,194	98.47	107,925,806
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79,071,120,000	79,071,120,000	79,070,593,108	0	79,070,593,108	100	526,892
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	3,372,651,000	3,372,650,672	0	3,372,650,672	100	328
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	89,592,477,000	89,592,477,000	89,517,232,519	33,208,545	89,484,023,974	99.92	108,453,026
	JUMLAH RUPIAH MURNI	228,163,494,000	230,700,539,000	229,776,554,462	954,121,594	228,822,432,868	99.6	1,878,106,132
09	HIBAH LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	249,600,000	249,600,000	0	249,600,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	0	253,100,000	249,600,000	0	249,600,000	98.62	3,500,000
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	26,632,097,000	26,630,113,660	0	26,630,113,660	99.99	1,983,340
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	34,936,715,000	34,932,718,861	0	34,932,718,861	99.99	3,996,139
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	459,916,000	459,915,230	0	459,915,230	100	770
536111	Belanja Modal Lainnya	0	3,252,027,000	3,178,561,693	31,842,698	3,146,718,995	96.76	105,308,005
	JUMLAH BELANJA MODAL	0	65,280,755,000	65,201,309,444	31,842,698	65,169,466,746	99.88	111,288,254
	JUMLAH HIBAH LUAR NEGERI	0	65,533,855,000	65,450,909,444	31,842,698	65,419,066,746	99.87	114,788,254
	TOTAL	228,163,494,000	296,234,394,000	295,227,463,906	985,964,292	294,241,499,614	99.66	1,992,894,386

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 123
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 439005
JENIS SATUAN KERJA : KP

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/06/24 4:02 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,975,068,000	5,600,837,000	5,472,028,250	19,262,600	5,452,765,650	97.7	148,071,350
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,966,000	12,778,000	102,228	6,808	95,420	0.8	12,682,580
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	300,272,000	319,843,000	299,920,198	0	299,920,198	93.77	19,922,802
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	137,760,000	137,760,000	80,269,964	0	80,269,964	58.27	57,490,036
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	329,000,000	329,000,000	294,280,000	0	294,280,000	89.45	34,720,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	137,130,000	346,450,000	325,954,000	0	325,954,000	94.08	20,496,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	473,410,000	82,950,000	60,381,999	0	60,381,999	72.79	22,568,001
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	254,856,000	316,837,000	296,270,220	0	296,270,220	93.51	20,566,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,103,760,000	768,285,000	716,514,000	0	716,514,000	93.26	51,771,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	170,800,000	280,985,000	262,710,000	740,000	261,970,000	93.5	19,015,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	7,896,022,000	8,195,725,000	7,808,430,859	20,009,408	7,788,421,451	95.27	407,303,549
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	2,491,344,000	4,542,437,000	4,282,195,660	0	4,282,195,660	94.27	260,241,340
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	5,324,866,000	3,386,664,000	3,136,004,222	0	3,136,004,222	92.6	250,659,778
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	7,816,210,000	7,929,101,000	7,418,199,882	0	7,418,199,882	93.56	510,901,118
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	845,453,000	845,452,500	0	845,452,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	12,000	11,942	0	11,942	99.52	58
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	41,828,000	41,827,650	0	41,827,650	100	350
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	11,806,000	11,569,350	0	11,569,350	98	236,650
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	18,040,000	16,960,000	0	16,960,000	94.01	1,080,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	45,118,000	44,972,820	0	44,972,820	99.68	145,180
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	209,289,000	183,446,000	0	183,446,000	87.65	25,843,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	1,171,546,000	1,144,240,262	0	1,144,240,262	97.67	27,305,738
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	582,000,000	258,000,000	182,383,000	0	182,383,000	70.69	75,617,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	42,000,000	14,184,000	0	14,184,000	33.77	27,816,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	582,000,000	300,000,000	196,567,000	0	196,567,000	65.52	103,433,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,216,476,000	6,153,800,000	6,040,143,466	0	6,040,143,466	98.15	113,656,534
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	1,085,075,000	1,077,777,737	0	1,077,777,737	99.33	7,297,263
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	6,216,476,000	7,238,875,000	7,117,921,203	0	7,117,921,203	98.33	120,953,797

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 123 **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 439005 **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**
JENIS SATUAN KERJA : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 20/06/24 4:02 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	22,510,708,000	24,835,247,000	23,685,359,206	20,009,408	23,665,349,798	95.37	1,169,897,202
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	19,935,954,000	14,748,411,000	14,746,079,617	0	14,746,079,617	99.98	2,331,383
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	478,500,000	613,104,000	612,700,673	0	612,700,673	99.93	403,327
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150,000,000	269,425,000	269,423,800	0	269,423,800	100	1,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,240,000	636,540,000	636,322,000	0	636,322,000	99.97	218,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	100,000,000	1,525,800,000	1,525,648,600	48,601	1,525,599,999	99.99	200,001
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,180,800,000	267,109,000	267,108,911	0	267,108,911	100	89
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	21,907,494,000	18,060,389,000	18,057,283,601	48,601	18,057,235,000	99.98	3,154,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	10,513,849,000	6,069,704,000	6,056,475,471	0	6,056,475,471	99.78	13,228,529
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,812,740,000	3,886,783,000	3,899,810,000	54,872,500	3,844,937,500	100.34	41,845,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,066,120,000	3,582,200,000	3,572,339,444	2,343,000	3,569,996,444	99.72	12,203,556
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	249,600,000	249,600,000	0	249,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	22,392,709,000	13,797,787,000	13,787,724,915	57,215,500	13,730,509,415	99.93	67,277,585
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	700,350,000	1,710,058,000	1,709,300,278	0	1,709,300,278	99.96	757,722
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	310,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,010,350,000	1,710,058,000	1,709,300,278	0	1,709,300,278	99.96	757,722
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	144,000,000	1,946,880,000	1,946,809,555	0	1,946,809,555	100	70,445
522112	Belanja Langganan Telepon	64,000,000	37,717,000	37,709,530	0	37,709,530	99.98	7,470
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	107,239,000	107,238,326	0	107,238,326	100	674
522141	Belanja Sewa	5,446,523,000	4,006,555,000	4,003,713,275	0	4,003,713,275	99.93	2,841,725
522151	Belanja Jasa Profesi	1,276,000,000	2,342,515,000	2,341,078,459	150,000	2,340,928,459	99.94	1,586,541
522191	Belanja Jasa Lainnya	8,189,960,000	10,863,596,000	10,788,736,757	0	10,788,736,757	99.31	74,859,243
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	30,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	15,210,483,000	19,304,502,000	19,225,285,902	150,000	19,225,135,902	99.59	79,366,098
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,072,500,000	708,072,000	707,972,931	0	707,972,931	99.99	99,069
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,231,400,000	2,750,817,000	2,747,479,393	0	2,747,479,393	99.88	3,337,607
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,200,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 123
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 439005
JENIS SATUAN KERJA : KP

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DKI JAKARTA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 20/06/24 4:02 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 20/5/24 2:07 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	800,500,000	590,982,000	590,977,385	0	590,977,385	100	4,615
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,127,600,000	4,049,871,000	4,046,429,709	0	4,046,429,709	99.92	3,441,291
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,945,687,000	40,601,584,000	40,806,691,502	482,122,908	40,324,568,594	100.51	277,015,406
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,939,120,000	1,380,751,000	1,379,703,612	100,000	1,379,603,612	99.92	1,147,388
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,509,528,000	4,883,890,000	4,871,998,628	2,340,000	4,869,658,628	99.76	14,231,372
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,181,288,000	6,453,357,000	6,327,079,747	25,309,476	6,301,770,271	98.04	151,586,729
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	49,575,623,000	53,319,582,000	53,385,473,489	509,872,384	52,875,601,105	100.12	443,980,895
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	2,836,050,000	6,283,726,000	6,612,064,843	333,617,156	6,278,447,687	105.23	5,278,313
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	2,836,050,000	6,283,726,000	6,612,064,843	333,617,156	6,278,447,687	105.23	5,278,313
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	116,060,309,000	116,525,915,000	116,823,562,737	900,903,641	115,922,659,096	100.26	603,255,904
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,321,357,000	33,705,803,000	33,629,102,399	33,208,545	33,595,893,854	99.77	109,909,146
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	10,321,357,000	33,705,803,000	33,629,102,399	33,208,545	33,595,893,854	99.77	109,909,146
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79,071,120,000	114,007,835,000	114,003,311,969	0	114,003,311,969	100	4,523,031
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	3,832,567,000	3,832,565,902	0	3,832,565,902	100	1,098
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	79,271,120,000	117,840,402,000	117,835,877,871	0	117,835,877,871	100	4,524,129
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	3,252,027,000	3,178,561,693	31,842,698	3,146,718,995	97.74	105,308,005
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	3,327,027,000	3,253,561,693	31,842,698	3,221,718,995	97.79	105,308,005
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	89,592,477,000	154,873,232,000	154,718,541,963	65,051,243	154,653,490,720	99.9	219,741,280
	JUMLAH BELANJA	228,163,494,000	296,234,394,000	295,227,463,906	985,964,292	294,241,499,614	99.66	1,992,894,386

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	294,241,499,614
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	643,624,002	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	27,999,999
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	22,701,384
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	483
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,726,877
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	570,195,259
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,472,028,250	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	102,228	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	299,920,198	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	80,269,964	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	294,280,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	325,954,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	60,381,999	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	296,270,220	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	716,514,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	262,710,000	0
3.0	511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	4,282,195,660	0
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	3,136,004,222	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	845,452,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11,942	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	41,827,650	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	11,569,350	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16,960,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	44,972,820	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	183,446,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	182,383,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	14,184,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,040,143,466	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,077,777,737	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14,746,079,617	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	612,700,673	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	269,423,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	636,322,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,525,648,600	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	267,108,911	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,056,475,471	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,899,810,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,572,339,444	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	9,500,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	249,600,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,709,300,278	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,946,809,555	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	37,709,530	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	107,238,326	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,003,713,275	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,341,078,459	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	10,788,736,757	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	707,972,931	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,747,479,393	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	590,977,385	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,806,691,502	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,379,703,612	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,871,998,628	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,327,079,747	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6,612,064,843	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,629,102,399	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114,003,311,969	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,832,565,902	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	3,178,561,693	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	75,000,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	19,262,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,808
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	48,601
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	54,872,500
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	2,343,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	150,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	482,122,908
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	100,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	2,340,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	25,309,476
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	333,617,156
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	33,208,545

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:00 AM
Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	31,842,698
JUMLAH			295,871,087,908	295,871,087,908

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 20 Juni 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

BUDI ACHMAD DJOHARI
196502121986031002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	15,366,818	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	3,233,600	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	262,612,763	0
0.0	131111	Tanah	115,257,138,280	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	112,687,705,297	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	227,740,585,177	0
0.0	134113	Jaringan	8,690,792	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	82,720,632	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3,131,310,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	51,003,301,211
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	13,507,176,293
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,690,792
0.0	162151	Software	4,681,402,268	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,340,116,387	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	7,095,373,227	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	7,090,260,665
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,270,694,304
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	200,627,183
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	487,316,054
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	13,707,151
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	294,241,499,614
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	643,624,002	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,887,427,000
0.0	391111	Ekuitas	0	234,989,317,600
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	28,320,609
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	31,842,698
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	27,999,999
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	22,701,384
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	483
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,958,242
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,452,765,650	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	95,420	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	299,920,198	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	80,269,964	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	294,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	325,954,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	60,381,999	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	296,270,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	709,410,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	261,970,000	0
3.0	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	4,282,195,660	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	3,136,004,222	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	845,452,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	11,942	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	41,827,650	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	11,569,350	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	16,960,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	44,972,820	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	183,446,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	182,383,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	14,184,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	6,040,143,466	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,077,777,737	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	14,986,603,602	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	612,700,673	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	261,018,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	636,322,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,525,599,999	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	258,117,911	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,040,893,751	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,844,937,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,569,296,144	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	9,500,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	249,600,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,961,100,163	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	37,313,590	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	107,831,126	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,000,593,756	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,340,928,459	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	12,996,495,943	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	709,328,931	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,729,165,393	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	590,977,385	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	39,947,184,322	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,219,043,612	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (123) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (439005) LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Tgl Data : 20/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 20/06/24 4:02 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,869,658,628	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6,512,550,271	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	6,278,447,687	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,525,310,479	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,212,142,266	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	586,969,182	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,100,049	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,562,757,419	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3,500,000	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	35,727,000	0
JUMLAH			631,831,841,282	631,831,841,282

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 20 Juni 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Biro Umum dan Kepegawaian

BUDI ACHMAD DJOHARI

196502121986031002

**Ikhtisar Laporan Keuangan Hibah Luar Negeri
Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Per 31 Desember 2023**

		LK HLN
1	Nama Hibah Luar Negeri	CF-NPGA
2	Pemberi Hibah	Pemerintah Jepang
3	Nama Proyek	Strengthening the Governance System for the Protection of Witnesses and Victims through Information and Communication Technology
4	<i>Grant ID</i>	70684001 , 70555701 , 70492601
5	No. Register	70684001 , 70555701 , 70492601
6	<i>Date Sign</i>	15 Februari 2022
7	<i>Date Effective</i>	15 Februari 2022 s.d. 31 Desember 2023
8	<i>Closing Date</i>	31 Desember 2023
9	<i>Loan Amount</i>	Rp 81.153.267.480
10	<i>Disbursement s.d. 2022</i>	Rp -
11	<i>Disbursement pada tahun 2023</i>	Rp 65.533.855.000
12	Belanja Tahun 2023 (Rupiah)	
	Belanja Modal	Rp 65.169.466.746
13	Neraca (Rupiah)	
	Aset tetap	Rp 65.169.466.746
14	Executing Agency	Kementerian Luar Negeri
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)	BPK

LAMPIRAN 1.

RINCIAN PEMBAYARAN PAJAK PADA BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN

No.	No. SPby	No. Kwitansi	Nilai
1	4619	4453	60.000
2	4618	4451	37.500
3	4551	4438	175.000
4	4549	4437	50.000
5	4547	4436	25.000
6	4545	4435	15.000
7	4540	4433	90.000
8	4520	4427	32.500
9	4510	4421	60.000
10	4505	4420	25.000
11	4500	4416	42.500
12	4498	4415	55.000
13	4452	4294	55.000
14	4440	4293	397.000
15	4440	4293	2.183.500
16	4410	4234	1.209.009
17	4409	4233	1.216.441
18	4408	4232	1.216.441
19	4407	4231	412.500
20	4407	4231	75.000
21	4406	4230	220.000
22	4406	4230	40.000
23	4399	4226	28.000
24	4393	4223	27.500
25	4389	4220	50.000
26	4225	4077	99.250
27	4216	4069	70.000
28	4215	4067	42.500
29	4168	4059	180.000
30	4166	4057	50.000
31	4165	4056	25.000
32	4159	4051	45.000
33	4125	3951	516.000
34	4124	3950	907.960
35	4123	3949	344.000
36	4052	3849	75.000
37	4052	3849	412.500
38	4051	3848	40.000
39	4051	3848	220.000
40	4011	3900	222.500
41	4005	3899	630.000
42	4001	3898	100.000

43	3975	3897	25.000
44	3971	3896	25.000
45	3967	3895	75.000
46	3966	3894	45.000
47	3956	3892	115.850
48	3955	3891	25.000
49	3942	3890	304.000
50	3939	3757	1.167.200
51	3852	3613	37.500
52	3606	3500	45.000
53	3323	3204	15.000
54	3322	3203	25.000
55	3111	3010	25.000
Total			13.707.151

BUKTI SETOR

2024-01-08	16:16:05	980953	TRANSFER KE TAX PAYMENT SSP. TRF FROM:9891044390051003 TO:3404 PEMINDAHAN KE 340450655 SIMSEM SUMARISASI E TAX MPN 9891044390051003 BPP 018 LPSK 03	Rp. 13,707,151	Rp. 13,707,151	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
------------	----------	--------	---	----------------	----------------	---	-------	----------	---------

LAMPIRAN 2.

PEMBAYARAN TAGIHAN PADA BENDAHARA PEMBANTU BIRO PEMENUHAN HAK SAKSI
DAN KORBAN



Transfer Berhasil

Rp1.659.677

Nomor Referensi	96854679
Tanggal Transaksi	6-Februari-2024
Waktu Transaksi	11:13:20 WIB

Layanan Transfer	BI-FAST
Bank Tujuan	CIMB NIAGA
Nomor Rekening	800109365700
Nama Penerima	GRAMARI PRIMA NUSA
BIZ ID	20240206BNINIDJA010002 96854679

Nama Pengirim	NURFIANINGSIH
Rekening Debet	*****524
Tujuan Transaksi	Lainnya
Berita	

Nominal	Rp1.659.677
Biaya Admin	Rp2.500
Total	Rp1.662.177

LAMPIRAN 3. PERSEDIAAN BARANG KONSUMSI

No.	Kode Barang	Nama Barang	Nilai
1	1010301001	Alat Tulis	6.147.743
2	1010301003	Penjepit Kertas	987.345
3	1010301004	Penghapus/Korektor	443.544
4	1010301005	Buku Tulis	518.400
5	1010301006	Ordner	9.059.146
6	1010301008	Cutter	774.720
7	1010301010	Alat Perekat	1.900.320
8	1010301011	Stadler	1.645.960
9	1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	3.583.020
10	1010302001	Kertas HVS	11.941.380
11	1010302002	Berbagai Kertas	8.098.050
12	1010302003	Kertas Cover	200.000
13	1010302004	Amplop	4.686.860
14	1010302999	Kertas dan Cover Lainnya	273.000
15	1010303999	Bahan Cetak Lainnya	4.662.000
16	1010304004	Tinta/Toner Printer	144.797.625
17	1010304005	Disket	238.000
18	1010304006	USB/Flash Disk	381.840
19	1010306010	Batu Baterai	1.968.030
20	1010309001	Meterai	610.000
21	1010312999	Alat/Bahan Penunjang Kegiatan Keamanan Lainnya	8.671.320
22	1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	4.677.010
23	1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	40.620.678
24	1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	121.100
25	1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	1.025.486
26	1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	1.700.186
Total			259.732.763

LAMPIRAN 4. PENAMBAHAN NILAI PERALATAN DAN MESIN

4.1 Pembelian

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	3010305999	Pompa Lainnya	dummy	1	16.400.000
2	3020105089	Kendaraan/Mobil Pengawalan	Unit	1	890.000.000
3	3020201009	Baggage Trolley	Unit	6	16.539.000
4	3030103999	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)	dummy	1	31.000.000
5	3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	1	5.300.250
6	3050104002	Lemari Kayu	Buah	2	11.600.000
7	3050104003	Rak Besi	Buah	34	43.401.000
8	3050104004	Rak Kayu	Buah	22	124.375.000
9	3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	1	31.607.250
10	3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	4	35.520.000
11	3050104013	Buffet	Buah	1	3.800.000
12	3050104015	Locker	Buah	11	77.209.380
13	3050104020	Lemari Display	Buah	2	4.000.000
14	3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	2	3.000.000
15	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	10	581.434.231
16	3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	16.711.256
17	3050105053	Acces Control System	Buah	3	135.188.652
18	3050105095	Wastafel Portable	unit	1	2.960.000
19	3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	4	5.550.000
20	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	3.512.850
21	3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	101	667.328.955
22	3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	291	564.319.934
23	3050201004	Kursi Kayu	Buah	6	19.314.000
24	3050201005	Sice	Buah	6	29.065.800
25	3050201008	Meja Rapat	Buah	55	142.863.350
26	3050201013	Meja Telepon	Buah	4	11.807.740
27	3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	23.310.000
28	3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	19	94.328.720
29	3050201021	Pot Bunga	Buah	12	44.905.050
30	3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	1	3.330.000
31	3050201026	Nakas	Buah	15	59.278.000
32	3050201030	Meja Taman	Buah	1	1.280.000
33	3050204001	Lemari Es	Buah	2	5.597.700
34	3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1	1.251.000
35	3050205008	Kitchen Set	Buah	8	43.003.500
36	3050206002	Televisi	Buah	10	467.236.170

37	3050206007	Loudspeaker	Buah	1	4.301.250
38	3050206008	Sound System	Buah	23	1.068.232.000
39	3050206015	Microphone Table Stand	Buah	4	12.320.000
40	3050206016	Mic Conference	Buah	1	4.085.400
41	3050206020	Camera Video	Buah	3	78.000.000
42	3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	9.990.000
43	3050206029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	2.070.150
44	3050206030	Tiang Bendera	Buah	28	53.668.500
45	3050206034	Tangga Aluminium	Buah	2	2.778.100
46	3050206036	Dispenser	Buah	1	1.802.500
47	3050206056	Karpet	Buah	3	312.215.000
48	3050206058	Gordyin/Kray	Buah	4	90.846.104
49	3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	2	2.480.000
50	3060101005	Audio Amplifier	Buah	5	225.656.000
51	3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	24	234.368.499
52	3060101068	Encoder/Decoder	Buah	1	39.923.750
53	3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	6	216.964.200
54	3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	3	35.452.000
55	3060102016	Video Switcher	Buah	3	90.330.000
56	3060102024	Video Processor	Buah	2	32.790.000
57	3060102045	Tripod Camera	Buah	3	16.960.000
58	3060102118	Head Set	Buah	4	14.000.000
59	3060102128	Camera Digital	Buah	4	140.244.000
60	3060102135	LCD Monitor	Buah	3	68.628.000
61	3060102164	Video Splitter	Buah	12	90.000.000
62	3060102168	Video Wall	unit	9	2.094.066.350
63	3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	23	251.220.000
64	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	4	17.062.451
65	3060334023	Power transmitter	Buah	2	16.908.000
66	3070106015	Laryngoscope	Buah	1	1.021.200
67	3070114001	Electrocardiograph	Buah	1	14.100.000
68	3080141170	Microwave Oven	Buah	1	2.070.150
69	3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	2	8.260.000
70	3080602046	Air Purlier	Buah	11	51.861.000
71	3100102001	P.C Unit	Buah	3	167.327.350
72	3100102003	Note Book	Buah	113	2.328.610.450
73	3100102007	Net Book	Buah	10	135.763.900
74	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	21.745.970

75	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	95.848.000
76	3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	13.780.000
77	3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	9	33.615.000
78	3100204001	Server	Buah	6	7.558.280.000
79	3100204002	Router	Buah	2	51.900.000
80	3100204014	Rak Server	Buah	1	43.500.000
81	3100204015	Firewall	Buah	11	3.098.098.800
82	3100204024	Switch	Buah	13	3.030.821.963
83	3100204026	Acces Point	Buah	63	1.160.568.000
84	3150404003	Public Address Branch Exchange (PABX)	Buah	1	26.090.520
85	3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	dummy	5	7.881.300
86	3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	2	179.173.040
87	3190103010	Treadmill	Buah	2	175.771.040
88	3190103015	Damble Set	Buah	2	46.675.440
89	3190106003	Sepeda Olah Raga	Buah	2	88.101.500
90	3190106008	Meja Sit Up Portable	Unit	2	30.192.750
Total					27.815.748.415

4.2 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	KDP	
				Kuantitas	Nilai
1	3010302001	Elevator /Lift	Unit	4	1.444.435.300
2	3010305999	Pompa Lainnya	dummy	30	3.576.062.628
3	3050104002	Lemari Kayu	Buah	38	546.244.244
4	3050104004	Rak Kayu	Buah	46	236.496.664
5	3050104013	Buffet	Buah	48	1.149.028.964
6	3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	67	118.180.285
7	3050105002	Hydrant	Buah	6	705.326.582
8	3050105004	Fire Alarm	Buah	5	2.283.223.620
9	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	7	1.432.025.862
10	3050105053	Acces Control System	Buah	18	216.132.500
11	3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	53	495.460.800
12	3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	170	705.620.182
13	3050201004	Kursi Kayu	Buah	106	289.391.588
14	3050201005	Sice	Buah	46	314.225.038
15	3050201008	Meja Rapat	Buah	6	61.124.734
16	3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	216	700.683.761
17	3050201013	Meja Telepon	Buah	20	78.965.148
18	3050201014	Meja Resepsionis	Buah	8	128.484.706
19	3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	30	277.360.212
20	3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	1	1.665.000
21	3050201026	Nakas	Buah	233	863.825.868
22	3050201030	Meja Taman	Buah	6	56.457.198
23	3050204002	A.C. Sentral	Buah	41	8.606.937.288
24	3050204004	A.C. Split	Buah	4	53.280.000
25	3050205008	Kitchen Set	Buah	2	71.328.008
26	3050206002	Televisi	Buah	23	1.327.999.500
27	3050206007	Loudspeaker	Buah		706.358.364
28	3050206042	Lambang Instansi	Buah	2	3.381.254.242
29	3050206057	Vertikal Blind	Buah	122	460.055.900
30	3060101005	Audio Amplifier	Buah	2	785.953.600
31	3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	12.500.000
32	3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	3	3.208.690.000
33	3060101057	Blank Panel	Buah	5	3.619.892.900
34	3060101060	Power Amplifier	Buah	1	14.885.000
35	3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	8.400.000
36	3060102016	Video Switcher	Buah	3	394.380.000
37	3060102024	Video Processor	Buah	7	385.800.000
38	3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	64	120.032.852
39	3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	52	500.375.614
40	3060102165	Camera Conference	Buah	1	2.870.000
41	3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	164.637.500
42	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	6	574.000.000

43	3060347002	Genset	Buah	4	4.666.263.700
44	3070111062	Bed Pasien	Buah	20	462.264.408
45	3080118041	Tangki Penyimpan	Buah	1	325.396.500
46	3100102001	P.C Unit	Buah	4	114.823.900
47	3100102007	Net Book	Buah	1	6.949.000
48	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	16.250.000
49	3100204002	Router	Buah	1	3.089.000
50	3100204006	Repeater and Transciever	Buah	2	22.200.000
51	3100204014	Rak Server	Buah	23	741.524.280
52	3100204024	Switch	Buah	1	1.369.873.464
53	3200101007	CCTV - Face Recognition	Buah	1	7.500.000
Total					47.816.185.903

4.3 Perolehan Lainnya

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	3050104013	Buffet	Buah	1	2.775.000
2	3050201004	Kursi Kayu	Buah	9	12.487.500
3	3050201005	Sice	Buah	12	38.561.400
4	3050201013	Meja Telepon	Buah	5	10.767.000
5	3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	20.000.000
6	3050206088	Bunga Plastik/Pohon Artificial	Buah	2	2.471.970
7	3060201001	Telephone (PABX)	Buah	2	190.728.020
8	3100204024	Switch	Buah	14	2.466.609.012
Total					2.744.399.902

LAMPIRAN 5. PENGURANGAN NILAI PERALATAN DAN MESIN

5.1 Penghentian Aset dari Penggunaan

No.	Kode Barang	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	9	1.834.287.000
2	3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	89.121.000
3	3020105089	Kendaraan/Mobil Pengawalan	Unit	1	388.800.000
4	3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	dummy	2	613.471.798
5	3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	1	2.062.500
6	3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Buah	2	3.047.000
7	3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	2	29.700.000
8	3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	25	68.880.372
9	3050104002	Lemari Kayu	Buah	4	36.300.000
10	3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	7	31.347.030
11	3050104013	Buffet	Buah	8	14.730.000
12	3050104015	Locker	Buah	11	13.896.300
13	3050105010	White Board	Buah	7	5.992.248
14	3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	66.660.000
15	3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	7.650.000
16	3050105051	Softboard	Buah	1	7.865.000
17	3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	Buah	3	150.777.000
18	3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	48	286.143.000
19	3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	80	142.946.375
20	3050201005	Sice	Buah	6	47.069.000

21	3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	3.025.000
22	3050201013	Meja Telepon	Buah	1	1.650.000
23	3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2	32.632.300
24	3050201028	Workstation	Buah	42	1.327.957.000
25	3050203004	Mesin Cuci	Buah	2	4.580.000
26	3050204001	Lemari Es	Buah	2	7.927.500
27	3050204004	A.C. Split	Buah	6	27.130.000
28	3050204006	Kipas Angin	Buah	3	20.850.000
29	3050206002	Televisi	Buah	4	107.619.436
30	3050206006	Equalizer	Buah	2	11.157.400
31	3050206007	Loudspeaker	Buah	2	24.023.200
32	3050206036	Dispenser	Buah	1	2.990.000
33	3060101060	Power Amplifier	Buah	1	8.547.105
34	3060102128	Camera Digital	Buah	4	11.315.700
35	3060201010	Facsimile	Buah	6	20.563.938
36	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	2	10.340.000
37	3070101005	Tensimeter	Buah	2	2.464.000
38	3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	847.000
39	3070101010	Timbangan Bayi	Buah	1	385.000
40	3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	1	2.475.000
41	3090404026	Button Camera	Buah	10	10.419.385
42	3100102001	P.C Unit	Buah	6	66.924.942
43	3100102003	Note Book	Buah	38	483.524.042
44	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	9.417.600
45	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	24	38.316.613
46	3150302014	Tenda Pelampang	Buah	1	1.599.000
47	3170119004	Jet Pump	Buah	1	9.075.000
Total					6.088.501.784

5.2 Koreksi Pencatatan

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Nilai
1	3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	722.217.650
2	3010305999	Pompa Lainnya	dummy	15	1.713.042.314
3	3050104002	Lemari Kayu	Buah	18	260.912.122
4	3050104004	Rak Kayu	Buah	23	118.698.332
5	3050104013	Buffet	Buah	24	574.514.482
6	3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	31	41.512.185
7	3050105002	Hydrant	Buah	3	352.663.291
8	3050105004	Fire Alarm	Buah	2	913.161.810
9	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	614.044.381
10	3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	20	213.528.525
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	79	331.526.291
12	3050201004	Kursi Kayu	Buah	53	144.695.794
13	3050201005	Sice	Buah	23	115.265.519
14	3050201008	Meja Rapat	Buah	3	30.562.367
15	3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	108	350.341.884
16	3050201013	Meja Telepon	Buah	10	39.482.574
17	3050201014	Meja Resepsionis	Buah	4	64.242.353
18	3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	14	107.600.106
19	3050201026	Nakas	Buah	116	424.088.134
20	3050201030	Meja Taman	Buah	3	28.228.599
21	3050204002	A.C. Sentral	Buah	19	4.157.668.644
22	3050205008	Kitchen Set	Buah	1	35.664.004
23	3050206007	Loudspeaker	Buah	1	335.329.182
24	3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	3.369.885.949
25	3050206057	Vertikal Blind	Buah	61	230.027.950
26	3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	392.976.800
27	3060101057	Blank Panel	Buah	2	1.562.540.200
28	3060102016	Video Switcher	Buah	1	173.390.000
29	3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	34	60.016.426
30	3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	26	250.187.807
31	3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	164.637.500
32	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	4	289.650.000
33	3060347002	Genset	Buah	1	1.146.100.000
34	3070111062	Bed Pasien	Buah	10	231.132.204
35	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	8.125.000
36	3100204024	Switch	Buah	-	2.464.056.012
Total					22.031.716.391

4. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat KL

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA)
AUDITED TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode dan Nama K/L : (123) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	Ada		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	Ada		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	Ada		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	Ada		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	Ada		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	Ada		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	Ada		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	Sama		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	Sama		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	Sama		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	Sama		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	Ya		Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	Ya		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		tidak	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		tidak	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		tidak	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		tidak	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		tidak	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		tidak	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		tidak	Tidak
	a. Pagu/DIPA		tidak	Tidak
	b. Estimasi PNB		tidak	Tidak
	c. Belanja		tidak	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		tidak	Tidak
	e. Pendapatan		tidak	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		tidak	Tidak

	g. Kas BLU		tidak	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		tidak	Tidak
	i. Kas Hibah		tidak	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		tidak	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		tidak	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		tidak	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		tidak	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		tidak	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		tidak	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		tidak	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		tidak	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		tidak	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		tidak	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		tidak	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	Ya		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	Ya		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	Ya		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	Ya		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		tidak	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		tidak	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		tidak	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		tidak	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		tidak	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		tidak	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		tidak	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		tidak	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		tidak	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		tidak	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		tidak	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		tidak	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		tidak	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		tidak	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		tidak	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		tidak	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		tidak	Tidak

	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		tidak	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		tidak	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		tidak	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		tidak	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		tidak	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		tidak	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		tidak	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	Ya		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	Ya		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	Ya		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Ada		Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	Ya		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		Tidak	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		Tidak	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	Ya		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	Ya		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya		Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	Ya		Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		tidak	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	Ya		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	Ya		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		Tidak	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	Ya		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	Ya		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		Tidak	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	Ya		Ya

8	Terdapat saldo bernilai desimal		tidak	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		tidak	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		tidak	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		tidak	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	Ya		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		Tidak	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar			Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		tidak	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	Ya		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		tidak	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		tidak	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	Ya		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		Tidak	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	Ya		Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		Tidak	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		Tidak	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		Tidak	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	Ya		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	Ya		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		Tidak	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		Tidak	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		Tidak	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		Tidak	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)		Tidak	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		Tidak	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		Tidak	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		Tidak	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	Ya		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	Ya		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		Tidak	Ya/Tidak

	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		Tidak	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual AkruaI pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan AkruaI		Tidak	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		Tidak	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan AkruaI			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan AkruaI			Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		Tidak	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan AkruaI			Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan AkruaI		Tidak	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	Ya		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		Tidak	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	Ya		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	Ya		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	Ya		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	Ya		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan	Ya		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	Ya		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	Ya		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	Ya		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	Ya		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	Ya		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	Ya		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

--

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Ashari Jamaludin, S.E.)
NIP. 198711062022031003

Jakarta, 3 Mei 2024
Penelaah,



(Cita Mismiana, S.Ak.)
NIP. 198109292010122001